

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM MAKANAN BERGIZI
GRATIS DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RAHMAT KHALID

NIM. 210802093

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Khalid
NIM : 210802093
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat/Tanggal Lahir : Sabang, 13 Agustus 2002
Alamat : Cot Ba'u

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Agustus 2026

Yang Menyatakan,



The image shows an official stamp of UIN Ar-Raniry Banda Aceh. The stamp is rectangular with a yellow background and contains the text 'SEPUJUH RIBU RUPIAH' on the left, 'TTL 20' in the center, and 'METRAL TEMPLE' on the right. Below the stamp is a handwritten signature in black ink.

Rahmat Khalid

NIM. 210802093

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

RAHMAT KHALID

NIM. 210802093

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Saïd Amirulkamar, M.M., M.Si

NIP. 196110051982031007


Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.

NIP. 198905182023211032

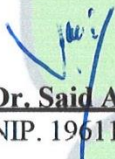
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM MAKANAN BERGIZI
GRATIS DI KOTA BANDA ACEH

RAHMAT KHALID
NIM. 210802093

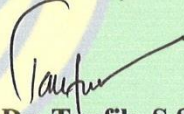
Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2026 M
Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Sekretaris,


Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.
NIP. 198905182023211032

Penguji I,


Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012

Penguji II,


Habibul Abrar, B.Sc., M.P.P.
NIP. 199407072025051005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Muji Mulla, S.Ag., M. Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berbasis Perpres No.83 Tahun 2024 bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat demi mendukung SDM unggul Indonesia Emas 2045, namun di tingkat lokal pelaksanaannya masih menghadapi tantangan distribusi, koordinasi dan pengawasan mutu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas serta hambatan pelaksanaan Program MBG dengan lokus spesifik di SPPG Bandar Raya Lamlagang dan SDN 50 Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipatif, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap 16 informan yang dianalisis menggunakan model interaktif (reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) serta kerangka Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dari Daniel Stufflebram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi MBG berjalan efektif, aspek konteks sesuai dengan kebutuhan siswa kurang mampu, aspek *input* didukung SDM dan perencanaan gizi terstruktur meskipun terdapat kendala keterlambatan pasokan bahan baku, aspek proses berjalan sesuai SOP dengan uji organoleptic serta penanganan alergi siswa, dan aspek produk berdampak positif terhadap peningkatan Kesehatan, energi, serta focus belajar siswa. Rekomendasi penelitian ini adalah SPPG perlu memperkuat koordinasi rantai pasok bahan baku dan pengawasan porsi, sekolah disarankan mempertahankan uji organoleptic serta permutakhiran data gizi/alergi siswa, dan Badan Gizi Nasional (BGN) Bersama pemerintah daerah perlu mengoptimalkan system pemantauan dan evaluasi terpadu secara berkala.

Kata Kunci: *Kebijakan, Makanan Bergizi Gratis, Banda Aceh, Evaluasi CIPP*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis sangat bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan langit bumi dan seluruh isinya yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayat-nya. Shalawat dan Salam penulis junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berpengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul: **“Evaluasi Kebijakan Program Makanan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Negeri 50 Kota Banda Aceh”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Aceh. Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hal materi maupun teknik penyusunan. Namun berkat bantuan dan support dari berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Muazzinah, B.Sc., MPA., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Zakki Fuad Khalil, M.Si., Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si. Selaku pembimbing I yang sangat membantu dalam meluangkan waktu tenaga dan pikiran serta sabar memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Taufik, S.Sos., M.Si. Selaku pembimbing II yang penuh kesabaran dengan mengarahkan, meluangkan waktu, arahan, tenaga, saran, kritik, serta juga motivasi kepada penulis selama pengusunan skripsi supaya bisa menghasilkan skripsi yang baik.
6. Segenap seluruh dosen di lingkungan prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmu nya kepada penulis.

7. Penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada orangtua tercinta, ibu yang bisa menjadi sosok ayah sekaligus ibu, Ibunda Mutia Lena atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, serta motivasi yang tidak pernah putus kepada penulis, juga Ayahanda alm.Zainuddin yang selalu terasa masih ada bersama walaupun sudah tiada, dan juga kepada adik kandung Naufal Ridha yang senantiasa bersama di saat senang dan juga susah terus saling menguatkan satu sama lain, berkat didikan dari kedua orangtua di masa dulu penulis bisa menjadi pribadi yang bisa bertahan hingga sekarang.
8. Penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga di Neusu yang senantiasa membantu penulis di saat susah maupun senang, memberikan doa, semangat, serta kebersamaan yang penuh dengan kehangatan.
9. Terima kasih kepada teman seperjuangan leting 2021, teman Loem coffe, dan sahabat-sahabat Grup PNS yang terus memberikan semangat, dukungan, serta kebersamaan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi selesai dengan baik.

Banda Aceh, 20 Agustus 2026

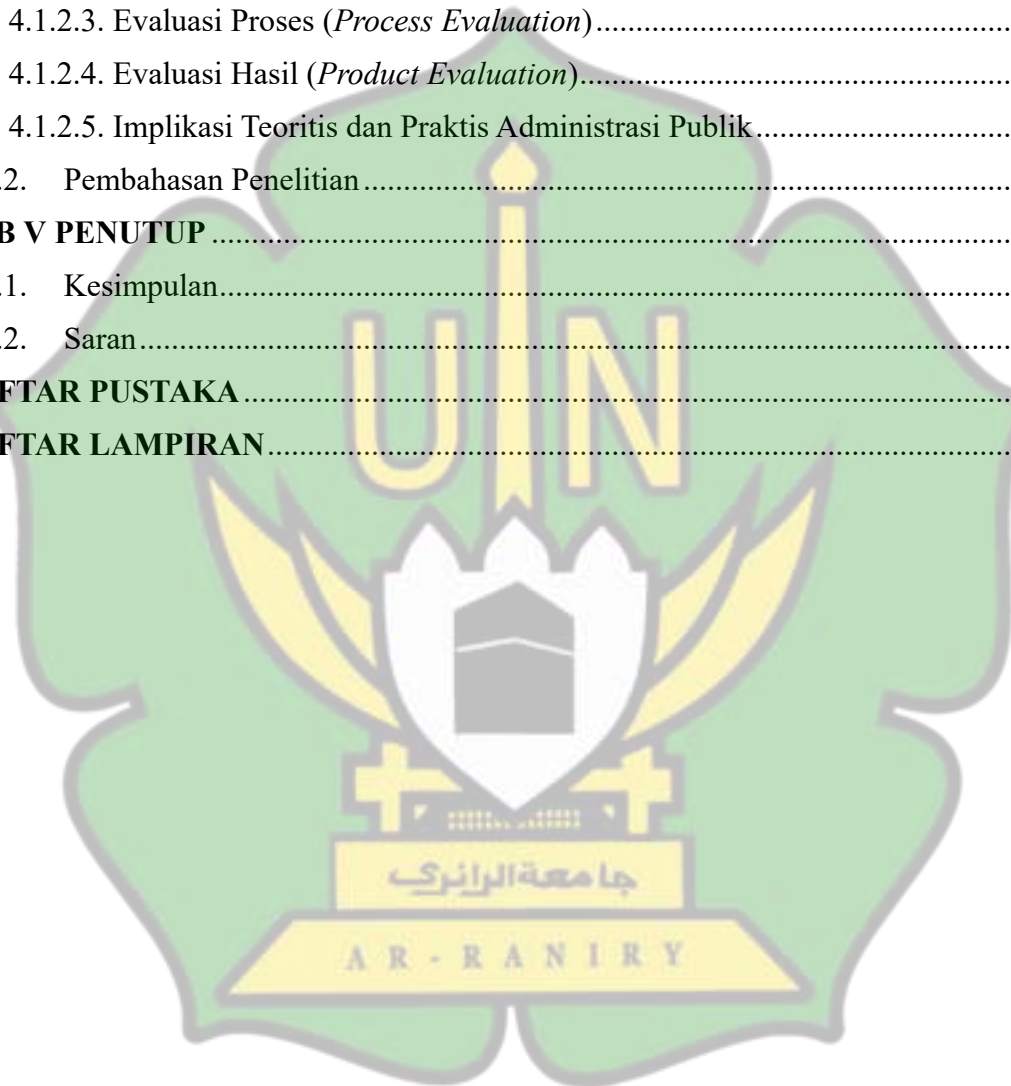


Rahmat Khalid
NIM. 210802093

DAFTAR ISI

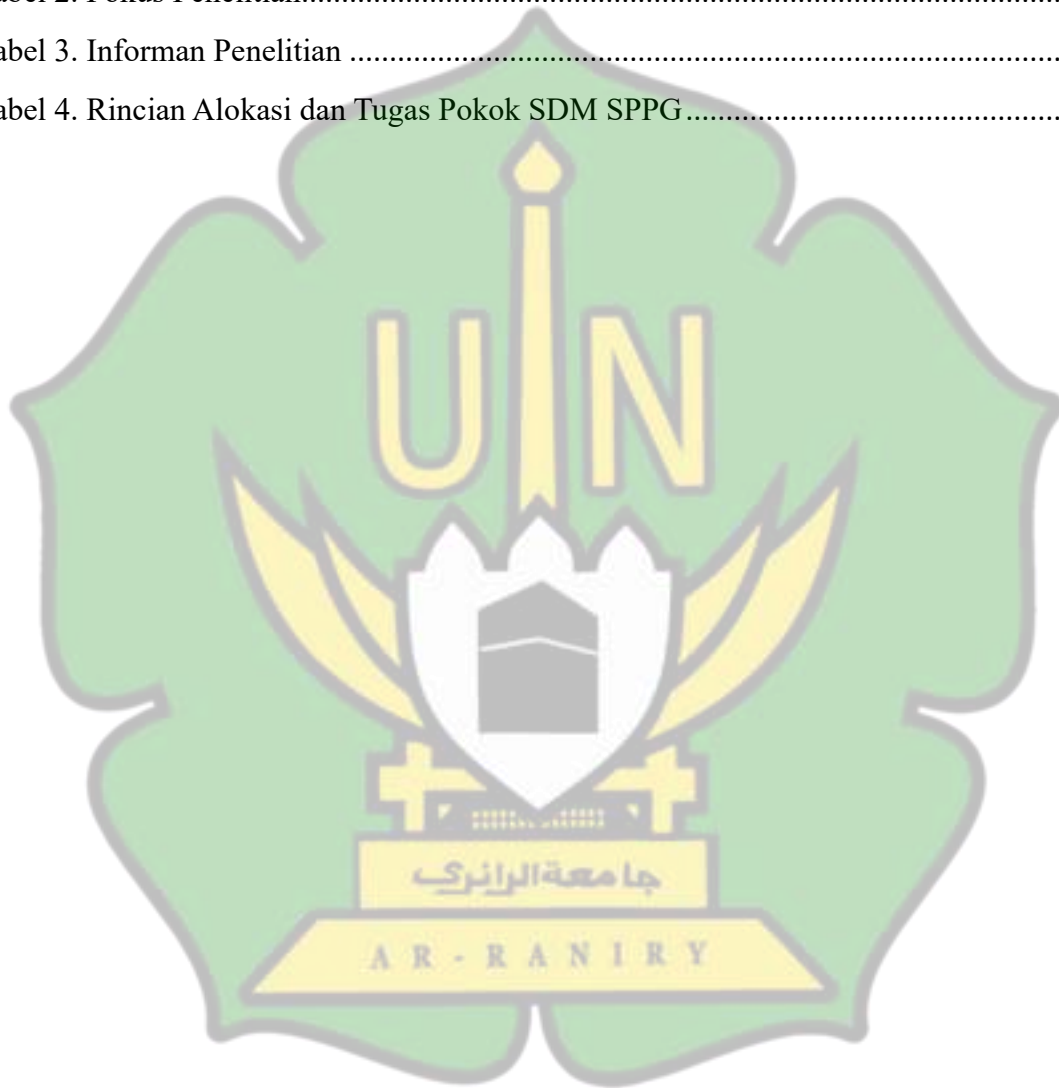
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Rumusan Penelitian.....	10
1.4. Tujuan Penelitian.....	10
1.5. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Landasan Teori	12
2.1.1. Teori Kebijakan	12
2.1.2. Teori Efektivitas	16
2.1.3. Teori Evaluasi.....	18
2.3. Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1. Desain Penelitian	31
3.2. Fokus Penelitian	31
3.3. Lokasi Penelitian	32
3.4. Sumber Data	33
3.5. Teknik Pengumpulan Data	34
3.6. Informan Penelitian	35
3.7. Teknik Analisis Data	35
3.8. Teknik Keabsahan Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36

4.1. Hasil Penelitian.....	36
4.1.1. Gambaran Umum Pendidikan Disabilitas di Kota Banda Aceh.....	36
4.1.2. Pelaksanaan Kebijakan MBG di Kota Banda Aceh	37
4.1.2.1. Evaluasi Konteks (<i>Context Evaluation</i>)	40
4.1.2.2. Evaluasi Masukan (<i>Input Evaluation</i>).....	44
4.1.2.3. Evaluasi Proses (<i>Process Evaluation</i>).....	49
4.1.2.4. Evaluasi Hasil (<i>Product Evaluation</i>).....	51
4.1.2.5. Implikasi Teoritis dan Praktis Administrasi Publik.....	53
4.2. Pembahasan Penelitian	54
BAB V PENUTUP	62
5.1. Kesimpulan.....	62
5.2. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR LAMPIRAN	70



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Dapur di Kota Banda Aceh.....	6
Tabel 2. Fokus Penelitian.....	31
Tabel 3. Informan Penelitian	35
Tabel 4. Rincian Alokasi dan Tugas Pokok SDM SPPG.....	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tugas Evaluator	36
Gambar 2. Pembagian MBG Kepada Murid	39
Gambar 3. Tempat penurunan ompreng	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	70
Lampiran 2. Surat Keputusan Skripsi.....	74
Lampiran 3. Surat Penelitian	75
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian dari Dinas Pendidikan Aceh	76
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang masih menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan negara lain. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya pemenuhan gizi pada anak yang masih jauh dibawah target nasional, sehingga berdampak pada kualitas kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas generasi muda.¹ Kondisi ini berbanding terbalik dengan visi pembangunan jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara maju dalam mencapai Indonesia Emas yang ditargetkan pada tahun 2045 yang mengutamakan kualitas generasi unggul dan sehat. Menyikapi hal tersebut, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan kebijakan untuk meningkatkan gizi masyarakat melalui Evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).²

Program ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam memperbaiki pola makan, menurunkan angka stunting, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul merupakan kunci bagi kemajuan suatu bangsa. Presiden menempatkan hal ini sebagai prioritas utama dalam mewujudkan visi Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Salah satu program andalan yang dirancang untuk mendukung agenda tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program Makanan Bergizi

¹ Kementerian Kesehatan RI, “Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023,” Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023.

² Perpres Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional,” 2024.

Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia.³ Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) juga merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pemerataan kesejahteraan sosial dan juga bertujuan untuk memberi asupan makanan bergizi yang cukup kepada peserta didik khususnya yang kurang mampu.⁴ Landasan kelembagaan untuk program MBG ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 Tahun 2024, yang mengatur pembentukan dan tugas Badan Gizi Nasional (BGN), serta kerangka pelaksanaan program MBG secara nasional.⁵

Kebijakan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Banda Aceh merupakan langkah strategis pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah. Pelaksanaan program ini melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah yang berperan dalam memastikan tata kelola penyediaan, penyaluran, serta pemantauan distribusi makanan bergizi berjalan secara efisien.⁶ Fokus program tidak hanya pada distribusi makanan kepada para murid, tetapi juga mencakup pengawasan mutu dan edukasi pola makan sehat sebagai bagian dari promosi gizi nasional. Dengan demikian, Evaluasi kebijakan MBG di

³ D Nugroho, A., & Rahmawati, "Strategi Penanganan Stunting Dan Pemenuhan Gizi Anak Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 2023.

⁴ Khoiriyah Ulfah Dea Amanda, Dinda Maharani, Eva Julia, Khoirun Nisa, Yulfidha Diah Riana, "Implementasi Kebijakan Program Makanan Bergizi Gratis Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin," *Jurnal Ilmu Psikologi Dan Kesehatan* 03, no. 01 (2026): 778–81.

⁵ T. Etiawan, A., & Handayani, "Analisis Kelembagaan Dan Kebijakan Tata Kelola Gizi Nasional Pasca-Pembentukan Badan Gizi Nasional.," *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2024.

⁶ C. Putra, R., & Armia, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penguatan Pemenuhan Gizi Anak: Studi Efisiensi Penyaluran Program Pangan Nasional Di Banda Aceh," *Jurnal Kebijakan Publik & Administrasi Lokal*, 2024.

Banda Aceh menjadi upaya nyata dalam mendukung perbaikan status gizi, pembentukan kebiasaan makan sehat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.⁷

Dalam pelaksanaannya program MBG ini tidak lepas dari berbagai tantangan seperti adanya perbedaan kapasitas setiap daerah, ketersediaan infrastruktur, serta keterbatasan tenaga pelaksana dan juga tantangan dalam bidang logistik serta teknis yang dapat mempengaruhi keberhasilan program intervensi gizi di sekolah.⁸ MBG merupakan salah satu program rencana pembangunan jangka panjang yang di mana untuk memastikan keberhasilannya diperlukan adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi berdasarkan data dan harus transparan, akuntabel serta efisiensi.⁹

Sejumlah dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah didirikan untuk menyediakan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok-kelompok yang rentan terhadap masalah gizi. Sasaran utama dari Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) ini mencakup peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, serta pendidikan menengah di berbagai lingkungan pendidikan, seperti pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pesantren.¹⁰

⁷ S. Suryadi, K., & Rahmadani, "Kebijakan Pangan Dan Gizi Berkelanjutan: Evaluasi Peran Kelembagaan Dalam Program Intervensi Gizi Nasional," *Urnal Administrasi Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan*, 2024.

⁸ D. Nugroho, A., & Rahmawati, "Tantangan Logistik Dan Kapasitas Daerah Dalam Distribusi Intervensi Gizi Nasional Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 2023.

⁹ P Prasetyo, B., & Utomo, "Perencanaan Dan Evaluasi Program Strategis Nasional Menuju SDM Unggul," *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 2022.

¹⁰ H Fitriani, A., & Kurniawan, "Pemenuhan Gizi Berbasis Komunitas: Peran Satuan Pelayanan Gizi Dalam Intervensi Pangan Di Lingkungan Sekolah Dan Pesantren," *Jurnal Gizi Indonesia*, 2024.

Selain itu program ini juga menyasar anak-anak usia dibawah lima tahun (balita), ibu hamil, serta menyusui. Dengan cakupan yang luas ini, MBG bertujuan untuk memastikan pemenuhan gizi yang optimal bagi kelompok-kelompok rentan, sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan mereka, serta mendukung pembangunan gizi yang lebih baik.¹¹ Secara teknis, program Makan Bergizi Gratis (MBG) diterapkan melalui sistem yang terdesentralisasi namun tetap tersandarisasi di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN). Operasional program ini berfungsi sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang berfungsi sebagai satuan pusat produksi nutrisi. Mekanisme penerapannya mencakup penyusunan menu berdasarkan angka kecukupan gizi, penerapan bahan baku dari mitra lokal, untuk menggerakkan ekonomi daerah, serta distribusi harian yang terjadwal bagi peserta didik dan kelompok rentan. Namun dalam praktiknya, berbagai studi kasus terbaru (2025/2026) menunjukkan adanya disparitas yang signifikan di berbagai daerah wilayah Indonesia.¹²

Di wilayah Indonesia Timur dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), hambatan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur dasar. Penelitian dalam *Journal of Governance and Policy Innovation* (2024) menyoroti minimnya akses listrik dan air bersih untuk dapur SPPG di lokasi terpencil, yang mempersulit pengolahan makanan sesuai standar nasional. Masalah ini diperparah oleh kerentanan anggaran dan tingginya biaya logistik, seperti yang terjadi di Kota Ambon, dimana program sempat mengalami penghentian sementara akibat kendala operasional lokal.¹³

¹¹ R. T Putri, "Kesenjangan Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Wilayah Perkotaan Dan Perdesaan," *Jurnal Kebijakan Dan Pembangunan Daerah*, 2025.

¹² E Priyono, A. F., Riyanta, S., & Daryanto, "Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Pendekatan Kerawanan Pangan Siswa," *Jurnal Impresi Indonesia*, 2026.

¹³ A Hutapea, B., & Setiawan, "Analisis Tata Kelola Kebijakan Intervensi Gizi Dan Aksesibilitas Infrastruktur Pemenuhan Pangan Di Daerah 3T," *Journal of Governance and Policy Innovation*, 2024.

Sementara itu, di wilayah dengan infrastruktur yang lebih mapan seperti Pulau Jawa dan Sumatera, tantangan bergeser pada aspek birokrasi dan keamanan pangan. Di Provinsi Banten, ditemukan kendala sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah terkait kesiapan anggaran serta pelibatan UMKM.¹⁴ Di Kota Jambi, studi menurut teori Merilee S. Grindle (2026) menemukan bahwa dominasi keputusan pusat yang terlalu kuat seringkali tidak menemukan bahwa dominasi keputusan pusat yang terlalu kuat sering kali tidak fleksibel terhadap selera makan lokal siswa.¹⁵ Lebih jauh lagi, aspek pengawasan mutu menjadi isu krusial yang mengancam keselamatan peserta didik, hal ini terbukti dari kasus keracunan massal akibat kontaminasi bakteri di Kota Bogor pada Mei 2025 (Prima Gandhi, 2025).¹⁶

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Banda Aceh sendiri mulai dilaksanakan secara serentak sejak 6 Januari 2025 sebagai bagian dari program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia. Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya siswa mulai dari jenjang TK hingga SMA, serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pelaksanaan program ini di Banda Aceh dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di beberapa gampong.¹⁷

Adapun pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh masih mendapatkan permasalahan, seperti yang terjadi di Kabupaten Bireuen yang berfokus pada penerapan

¹⁴ M. Z Fathurilham, M. P., & Maulana, "Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Upaya Pemerintah Provinsi Banten Mewujudkan Kesejahteraan Sosial," *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2026.

¹⁵ D Silaban, S. L., Elsi, S. D., & Rizal, "Analisis Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis Di Kota Jambi Menurut Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle," *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 2026.

¹⁶ P. Gandhi, "Reformulasi Kebijakan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)," *Departemen Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan, IPB University*, 2025.

¹⁷ F Fatmawati, "Program Makan Bergizi Gratis Dimulai Di Banda Aceh," *Metro TV News*, 2025.

program Makan Bergizi Gratis (MBG) sempat menuai perhatian publik setelah ditemukannya belatung pada salah satu menu makanan yang disajikan di SDIT Azkiya pada September 2025. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa salah satu menu, yakni buah salak, mengalami kerusakan yang memunculkan belatung, sehingga dinyatakan tidak layak untuk dikonsumsi oleh siswa. Peristiwa ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam aspek pengawasan mutu serta proses pengemasan makanan.¹⁸

Berbagai dinamika ini menunjukkan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur lokal, transparansi tata kelola, serta ketatnya sistem pada kesiapan mutu di setiap daerah. Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan MBG di Kota Banda Aceh menjadi sangat penting sebagai representative efektivitas kebijakan nasional di wilayah ujung barat Indonesia.¹⁹

Secara administratif dapur SPPG di Aceh telah melaksanakan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), terdapat 518 dapur SPPG di masing-masing daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan secara khusus penelitian yang dilakukan hanya pada dapur SPPG dalam Kota Banda Aceh sejumlah 29 dapur tersebar di sembilan kecamatan dalam Kota Banda Aceh.

Tabel 1. Daftar Dapur di Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan SPPG	Kelurahan/Desa SPPG	Nama SPPG
-----	----------------	---------------------	-----------

¹⁸ N Notha, A., Ramadhan, M., & Fitriani, "Evaluasi Pengawasan Mutu Dan Manajemen Risiko Keamanan Pangan Pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen," *Jurnal Kebijakan Dan Keamanan Pangan Daerah*, 2025.

¹⁹ C Putra, R., & Armia, "Evaluasi Kesiapan Operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dalam Distribusi Makanan Bergizi Sehat Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Kebijakan Publik & Administrasi Lokal*, 2025.

1.	Kuta Raja	Merduati	SPPG Kota Banda Aceh Kuta Raja Merduati
2.	Ulee Kareng	Lambhuk	SPPG Kota Banda Aceh Ulee Kareng Lambhuk
3.	Baiturrahman	Neusu Jaya	SPPG Kota Banda Aceh Baiturrahman Neusu Jaya 2
4.	Banda Raya	Lam Ara	SPPG Kota Banda Aceh Banda Raya Lam Ara
5.	Meuraxa	Lamjabat	SPPG Kota Banda Aceh Meuraxa Lamjabat
6.	Syiah kuala	Ie Masen kayee Adang	SPPG Kota Banda Aceh Syiah Kuala IE Masen Kayee Adang
7.	Syiah kuala	Jeulingke	SPPG Kota Banda Aceh Syiah Kuala Jeulingke
8.	Meuraxa	Blang Oi	SPPG Polda Aceh
9.	Leung Bata	Lamdom	SPPG Kota Banda Aceh Leung Bata Lamdom
10.	Kuta Alam	Mulia	SPPG Kota Banda Aceh Kuta Alam Mulia 3
11.	Jaya Baru	Lamjame	SPPG Kota Banda Aceh jaya Baru Lamjamee
12.	Baiturraahman	Ateuk Jawo	SPPG Kota Banda Aceh Baiturrahman Ateuk Jawo
13.	Jaya Baru	Lamteumen Timur	SPPG Kota Banda Aceh Jaya Baru Lamteumen Timur
14.	Banda Raya	Lamlagang	SPPG Kota Banda Aceh Banda Raya Lamlagang 2
15.	Jaya Baru	Bitai	SPPG Kota Banda Aceh jaya Baru Bitai
16.	Syiah Kuala	Lamgugob	SPPG Kota Banda Aceh Syiah Kuala Lamgugob
17.	Kuta Alam	Lambaro Skep	SPPG Kota Banda Aceh Kuta Alam Lambaro Skep
18.	Kuta Alam	Mulia	SPPG Kota Banda Aceh Kuta Alam Mulia 2
19.	Baiturrahman	Ateuk pahlawan	SPPG Kota Banda Aceh Baiturrahman Ateuk Pahlawan
20.	Syiah Kuala	Rukoh	SPPG Kota Banda Aceh Syiah Kuala Rukoh
21.	Kuta Alam	Keuramat	SPPG Kota Banda Aceh Kuta Alam Keuramat
22.	Syiah Kuala	Lamgugob	SPPG Kota Banda Aceh Syiah Kuala Tibang
23.	Kuta Alam	Lamdingin	SPPG Kota Banda Aceh Kuta Alam Lamdingin

24.	Banda Raya	Lamlagang	SPPG Kota Banda Aceh Banda Raya Lamlagang
25.	Banda Raya	Lhong Cut	SPPG Kota Banda Aceh Banda Raya Blang Cut
26.	Baiturrahman	Neusu Jaya	SPPG Kota Banda Aceh Baiturrahman Neusu Jaya
27.	Leung Bata	Leung Bata	SPPG Kota Banda Aceh Leung Bata
28.	Kuta Alam	Lampulo	SPPG Kota Banda Aceh Kuta Alam Lampulo
29.	Kuta Alam	Mulia	SPPG Kota Banda Aceh Kuta Alam Mulia

Sumber: bgn.go.id

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebaran SPPG di Kota Banda Aceh telah mencakup seluruh wilayah administratif kota. Penelitian ini membatasi ruang lingkup pada 29 unit SPPG yang tersebar di sembilan kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh. Fokus pada unit-unit tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam dan terukur mengenai efektivitas tata kelola serta standarisasi kualitas Program MBG di pusat ibu kota provinsi.

Meskipun dalam praktiknya program ini berjalan dengan rutin dan didukung oleh pelaksana lokal tetap harus ada evaluasi secara berkala berbasis data yang transparan dan akuntabel untuk melihat celah yang terjadi dan dapat melakukan perbaikan kedepannya. Oleh karena itu tidak hanya dilihat dari administrasi distributifnya saja tetapi harus dilihat juga dari segi konteks, masukan, proses, dan hasilnya. Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan dengan merujuk pada Model Evaluasi CIPP (*Context, input, process, product*) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam. Model ini digunakan untuk menilai keberhasilan program MBG dari empat dimensi utama, yaitu 1) *Context*, untuk mengevaluasi latar belakang kebutuhan dan kesesuaian tujuan program di daerah, 2) *input*, untuk menilai kesiapan sumber daya, anggaran, infrastruktur SPPG, serta koordinasi antar

pemangku kepentingan, 3) *process*, untuk memantau mekanisme penyaluran, pengawasan mutu, dan kendala teknis distribusi haian, serta 4) *product*, untuk mengukur pencapaian target efektivitas program pada penerima manfaat.²⁰

Mengingat adanya berbagai dinamika dan risiko dalam pelaksanaan di lapangan seperti kasus kontaminasi makanan yang pernah terjadi di wilayah lain maka evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan MBG di Kota Banda Aceh khususnya dapur SPPG Kota Banda Aceh Bandar Raya Lamlagang. Penelitian ini akan fokus pada satu sekolah yaitu SDN 50 Kota Banda Aceh.

Di karenakan Sekolah Dasar Negeri 50 ini menjadi salah satu sekolah memiliki siswa yang tergolong ramai dan juga disaat Program Makanan Bergizi Gratis berjalan di Banda Aceh, sekolah ini menjadi sekolah ke 2 yang melaksanakan program tersebut. Di kutip dari berita pemerintah daerah kota Banda Aceh bahwasanya program Makanan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Negeri 50 sudah berjalan dengan baik dan bisa menjadi contoh bagi dapur SPPG lain di daerah Banda Aceh.

Penelitian evaluatif ini penting dilakukan tidak hanya untuk memetakan keberhasilan administratif, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem pengawasan mutu dan distribusi di tingkat lokal benar-benar mampu menjamin keamanan serta kesehatan peserta didik sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia di masa depan.

²⁰ C Putra, R., & Armia, "Evaluasi Kesiapan Operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Di Kota Banda Aceh: Pendekatan Model CIPP," *Urnal Kebijakan Publik & Administrasi Lokal*, 2025.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terkait pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Banda Aceh sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Banda Aceh belum sepenuhnya berjalan optimal, khususnya pada saat pendistribusian, serta pengawasan mutu makanan, sehingga perlu dikaji bagaimana pelaksanaan program tersebut di tingkat sekolah.
2. Dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 50 Kota Banda Aceh masih ditemui berbagai hambatan, seperti kurang efektifnya koordinasi antar pihak, serta kendala teknis di lapangan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan program.

1.3. Rumusan Penelitian

1. Bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di SDN 50 Kota Banda Aceh berdasarkan komponen *Context, Input, Process* dan *Product* (CIPP)?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di SDN 50 Kota Banda Aceh?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 50 Kota Banda Aceh dalam mendukung pencapaian tujuan program, khususnya peningkatan status gizi dan kualitas sumber daya manusia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis di SDN 50 Kota Banda Aceh dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan program.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan publik, gizi, dan pendidikan, khususnya terkait Evaluasi program pemerintah. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), serta memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara perumusan kebijakan, pelaksanaan di lapangan, dan pencapaian tujuan program dalam konteks peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2. Manfaat Praktis Penelitian

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Banda Aceh, Badan Gizi Nasional, sekolah, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG. Penelitian ini memberikan pemikiran bagi studi evaluasi kebijakan public, khususnya dalam penerapan keangka/model evaluasi CIPP pada program gizi nasional di tingkat daerah. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi mengenai kendala distribusi makanan bergizi, pengawasan mutu makanan, kapasitas dapur penyedia, serta strategi edukasi gizi bagi peserta didik. Dengan demikian, diharapkan

program MBG dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berdampak positif terhadap peningkatan status gizi, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia peserta didik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Kebijakan

Secara umum, kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar bagi rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, atau cara bertindak. Ini adalah pernyataan tentang cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud yang berfungsi sebagai pedoman manajemen dalam upaya mencapai sasaran tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan seringkali merujuk pada keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan publik.²¹

Teori kebijakan membantu pemerintah dan para pengambil kebijakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu kebijakan, sehingga dapat mengidentifikasi sasaran, tujuan, dan strategi Evaluasinya.

Menurut Anderson mengatakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian Tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Berdasarkan pengertian tentang kebijakan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun pada

²¹ P Prasetyo, B., & Utomo, "Kebijakan Publik Dan Manajemen Strategis Sektor Publik," *Urnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 2024.

kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku negara pada umumnya yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan Negara atau kebijakan publik (*public policy*).²²

Indikator dari teori Anderson

1. Tujuan Kebijakan

Kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas dan ingin dicapai. Tujuan tersebut menjadi dasar dalam menentukan Tindakan yang akan dilakukan.

2. Serangkaian Tindakan

Kebijakan bukan hanya keputusan atau pernyataan tetapi terdiri dari berbagai tindakan atau langkah yang dilakukan secara terarah dan berkelanjutan.

3. Perilaku Kebijakan

Kebijakan dilaksanakan oleh seseorang atau lebih seperti pemerintah lembaga, organisasi, atau pihak lain yang memiliki wewenang.

4. Tujuan Kebijakan

Kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas dan ingin dicapai. Tujuan tersebut menjadi dasar dalam menentukan Tindakan yang akan dilakukan.

5. Serangkaian Tindakan

²² J. E. Anderson, "Public Policy Making: An Introduction (8th Ed.).," *Cengage Learning*, 2024.

Kebijakan bukan hanya keputusan atau pernyataan tetapi terdiri dari berbagai tindakan atau langkah yang dilakukan secara terarah dan berkelanjutan.

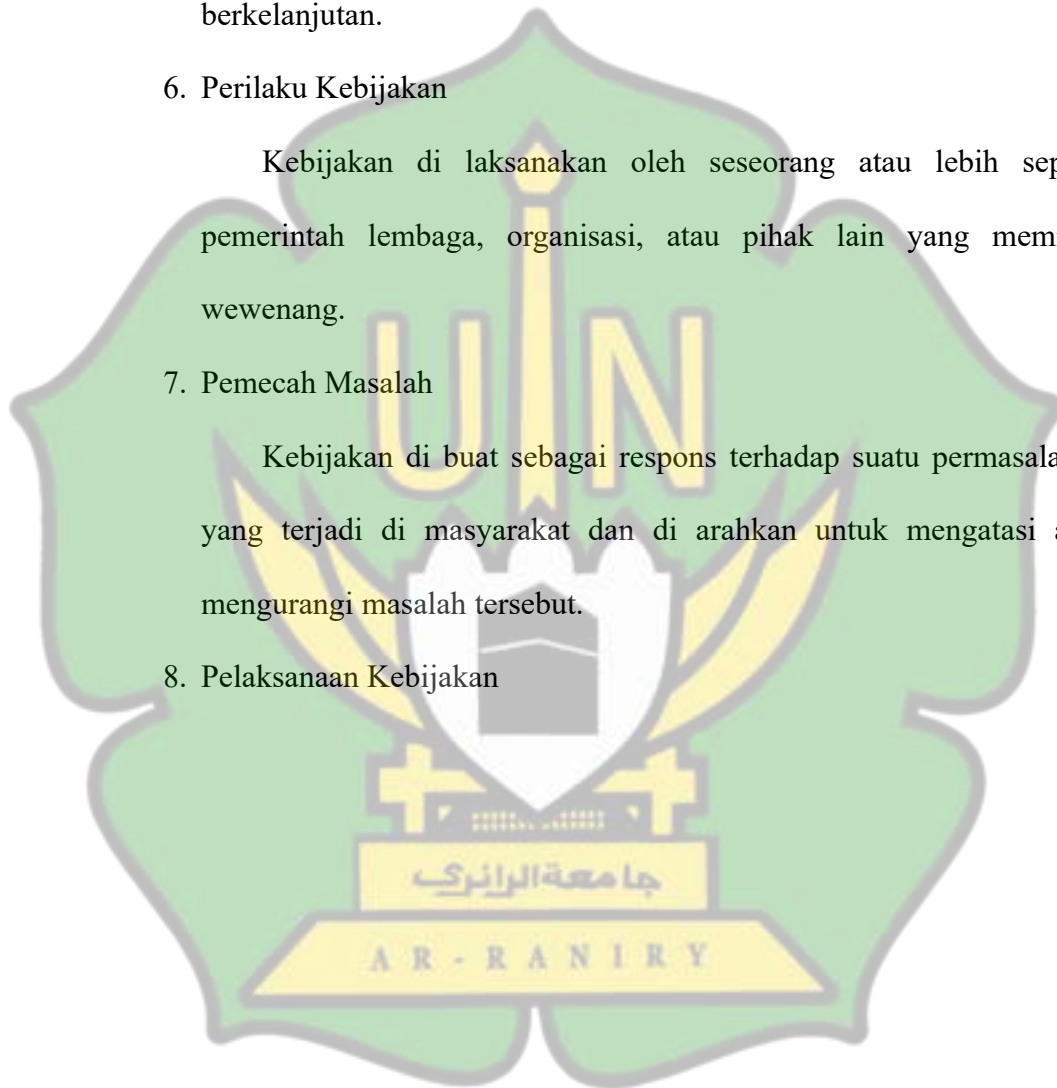
6. Perilaku Kebijakan

Kebijakan dilaksanakan oleh seseorang atau lebih seperti pemerintah lembaga, organisasi, atau pihak lain yang memiliki wewenang.

7. Pemecah Masalah

Kebijakan dibuat sebagai respons terhadap suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat dan di arahkan untuk mengatasi atau mengurangi masalah tersebut.

8. Pelaksanaan Kebijakan



2.1.2. Teori Efektivitas

Kata efektif mengacu pada terwujudnya suatu dampak atau hasil yang diinginkan dalam sebuah tindakan. Kata yang efektif berarti sukses, akurat, dan bermanfaat. Efektivitas adalah suatu kondisi yang mengandung pemahaman tentang munculnya suatu dampak atau hasil yang diinginkan. Jika seseorang melakukan tindakan dengan tujuan tertentu atau memiliki niat sebagaimana yang diharapkan, maka orang itu dianggap efektif.²³ Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai mampu memberikan hasil, sukses guna. Efektivitas adalah kondisi yang mencerminkan terjadinya efek atau hasil yang diharapkan, sehingga suatu tindakan dianggap efektif apabila menghasilkan dampak atau mencapai tujuan sesuai yang diinginkan.²⁴ Adapun efektivitas menurut para ahli, sebagai berikut:

Menurut Richard M. Steers, efektivitas diartikan sebagai seberapa jauh organisasi menjalankan semua tugas utamanya atau mencapai semua tujuan. Konsep ini menekankan pada pencapaian tujuan akhir organisasi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.²⁵

²³ E. B Prasetya, *Efektivitas Kebijakan Publik: Teori Dan Praktik* (Bintang Pustaka Utama, 2024).

²⁴ R Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi (Ed. Revisi)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2023).

²⁵ R. Hasbullah, H., Aristin, R., Syaiful, S., Anam, S., & Kasanova, "Efektivitas Organisasi Dalam Perspektif Model Richard M. Steers Di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang," *KABILAH: Journal of Social Community*, 2022.

Indikator dari teori Richard M. Streers

1. Pencapaian Tujuan

Menunjukkan sejauh mana tujuan dari suatu program dapat tercapai sesuai yang telah di rencanakan. Semakin banyak tujuan yang trcapa,, maka semakin efektif program tersebut.

2. Integritas

Menunjukkan kemampuan pihak yang menjalankan program dalam berkomunikasi, berkoordinasi, dan memberikan informasi kepada pihak yang menerima program. Komunikasi dan koordinasi yang baik dapat membantu program berjalan dengan lancar.

3. Adaptasi

Menunjukkan kemampuan pihak yang menjalankan program dalam menyesuaikan program dengan perubahan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Program yang mampu menyesuaikan diri akan lebih mudah diterima dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan pandangan pakar di atas, maka efektivitas kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran yang dapat menunjukkan sejauh mana tujuan yang bisa diraih oleh karyawan sesuai dengan target atau standar yang telah ditetapkan ditentukan perusahaan atau organisasi, apakah pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik atau belum.²⁶

²⁶ N Mayisi, "Analisis Efektivitas Kerja Karyawan Dalam Pencapaian Target Organisasi Pada Instansi Publik," *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Administrasi Bisnis (JIMAB)*, 2023.

2.1.3. Teori Evaluasi

Proses penentuan kondisi dimana tujuan telah dicapai dikenal sebagai evaluasi. Definisi di atas menunjukkan hubungan evaluasi dengan tujuan suatu kegiatan, yang mengukur seberapa jauh sesuatu dapat dicapai. Evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris "*evaluation*", yang berarti penilaian atau penilaian, dan didefinisikan sebagai kegiatan terencana untuk mengamati keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan membandingkan hasilnya dengan ukuran untuk mencapai kesimpulan. Menurut Brinkerhoff dalam Sawitri evaluasi merupakan penyelidikan yang sistematis dalam aspek pengembangan program dari berbagai sektor untuk mengevaluasi kegunaan dan kemanfaatan.²⁷

Evaluasi program merupakan aktivitas investigasi yang tertata tentang sesuatu yang berharga dan bernilai dari suatu objek. Denzim dan Licoln berpendapat bahwa evaluasi program berorientasi pada hal-hal yang diperhatikan oleh pemerintah sebagai penyandang dana dengan mempertanyakan sejauh mana keberhasilan yang dicapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan.²⁸

Ada beberapa model yang digunakan dalam evaluasi program yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam salah satunya model evaluasi yang diterapkan dalam studi ini yaitu evaluasi model CIPP, sebab model ini adalah model evaluasi yang dilaksanakan dengan cara kompleks yang mencakup

²⁷ I awitri, D., & Rahmawati, "Evaluasi Keberhasilan Program Melalui Pendekatan Sistematis Brinkerhoff Pada Organisasi Publik," *Urnal Evaluasi Dan Kebijakan Pendidikan*, 2022.

²⁸ Siti Muniroh, "Evaluasi Program Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dalam Pencapaian Target Organisasi," *Jurnal Evaluasi Dan Kebijakan Publik*, 2024.

Context (konteks), *Input* (masukkan), *Process* (proses), *Product* (hasil).²⁹

Model ini sangat komprehensif dan sesuai untuk mengukur efektivitas pada program dalam suatu organisasi.

Dalam penelitian ini, model CIPP digunakan sebagai kerangka kerja utama untuk merumuskan indikator-indikator evaluasi yang sistematis. Setiap komponen dalam CIPP mulai dari konteks, masukan, proses, hingga hasil dijabarkan menjadi indikator spesifik yang berfungsi sebagai tolak ukur dalam menilai Tingkat keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan program secara komprehensif. Rincian indikator evaluasi berdasarkan model CIPP tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Indikator Penelitian

1. *Context Evaluation* (Evaluasi Konteks)

Evaluasi konteks adalah situasi atau latar belakang yang mempengaruhi perencanaan program pembinaan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai aset dan peluang untuk membantu pembuat kebijakan menentukan prioritas serta membantu kelompok lainnya untuk mengetahui tujuan, peluang, dan hasilnya. Evaluasi konteks menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan program yang akan dilaksanakan. Evaluasi konteks juga berhubungan dengan analisis masalah kekuatan dan kelemahan dari suatu program yang akan dilakukan atau sedang berjalan.

²⁹ A Pratiwi, N. L., & Rahmawati, "Penerapan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) Dalam Mengukur Efektivitas Program Organisasi," *Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2023.

Evaluasi konteks sendiri melayani keputusan perencanaan yaitu membantu perencanaan dalam pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan tujuan, dan merumuskan tujuan program. Adapun fokus evaluasi konteks ini adalah menghasilkan informasi tentang berbagai macam kebutuhan yang sudah ditentukan prioritasnya sehingga tujuan dapat diformulasikan.³⁰

2. *Input Evaluation* (Evaluasi Masukan)

Evaluasi *input* merupakan masukan yang dapat menunjang tercapainya program pembinaan seperti mengatur keputusan dalam menentukan sumber yang tersedia, opsi yang diambil, rencana, strategi, serta prosedur kerja. Evaluasi *input* menganalisis terkait personal yang berhubungan dengan bagaimana mengelola sumber-sumber yang tersedia, alternatif strategi yang harus di pertimbangkan agar dapat mencapai tujuan suatu program.

Evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sistem, membuat opsi strategi yang akan digunakan untuk Evaluasi, serta pembiayaan dan juga jadwal program pembinaan. Evaluasi ini juga menyediakan informasi tentang masukan yang sudah dipilih, analisis SWOT (kekuatan dan kelemahan) strategi dan desain untuk merealisasikannya sesuai dengan tujuan.³¹

³⁰ N Rahman, F., & Fitriani, "Analisis Masalah Dan Penetapan Prioritas Program Melalui Pendekatan Evaluasi Konteks CIPP," *Jurnal Manajemen Dan Perencanaan Organisasi*, 2023.

³¹ Rahman, F., & Fitriani.

3. *Process Evaluation* (Evaluasi Proses)

Sebuah program yang baik tentunya telah dirancang mengenai aktivitas dan kapan aktivitas tersebut dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan identifikasi kelemahan program dari berbagai sisi sehingga perbaikan dalam pelaksanaan program dapat dilakukan dengan lebih mudah. Bisa dikatakan bahwa evaluasi proses merupakan pelaksanaan strategi serta pemanfaatan sumber daya dan bahan dalam kegiatan di lapangan.

Seorang penilaian proses dapat memantau sistem pengumpulan data dari pelaksanaan program dengan melihat evaluasi yang telah dirancang dan diterapkan selama proses. Setiap langkah dalam pelaksanaan program harus dicatat dan dikembangkan oleh pemonitor. Tanpa catatan tentang data pelaksanaan program, pengambil keputusan tidak akan dapat menentukan tindak lanjut program setelah waktunya berakhir. Catatan tersebut akan membantu menentukan kelemahan dan kekuatan, serta faktor pendukung dan penghambat program.

Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memperbaiki keadaan saat ini. Evaluator diminta untuk mengevaluasi seberapa efektif rencana program Makanan Bergizi Gratis diEvaluasikan di lapangan dan mengidentifikasi kendala yang ditemui.³²

4. *Product Evaluation* (Evaluasi Hasil)

³² Yulia Cerita, "Evaluasi Efektivitas Dan Kendala Implementasi Lapangan Program Makanan Bergizi Gratis," *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2023.

Tahap terakhir adalah evaluasi hasil, yang mengevaluasi seberapa berhasil organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsinya adalah untuk membantu penanggung jawab program membuat keputusan, mengubah, atau menghentikannya. Dalam menilai keberhasilan, asesor membuat kesimpulan ini.³³

Tujuan diciptakan dan dikelola untuk mencapai data yang dihasilkan akan sangat membantu pengambil keputusan dalam memutuskan untuk melanjutkan, menghentikan, atau mengubah program. Evaluasi hasil memerlukan perbandingan antara tujuan yang ditetapkan dalam desain dan hasil program yang dicapai. Hasil yang dievaluasi dapat berupa skor tes, data observasi, dan data diagram, yang masing-masing dapat ditelusuri dalam kaitannya dengan tujuan yang lebih rinci. Kategori hasil studi menentukan evaluasi hasil.³⁴

Tujuan utama evaluasi hasil adalah untuk mengetahui seberapa baik kurikulum telah memenuhi kebutuhan kelompok yang menggunakannya. Hasil yang diharapkan efek langsung dan tidak langsung dari program ditunjukkan dalam evaluasi ini. Efek dari inovasi kurikulum adalah positif dan negatif (biasanya evaluasi hasil hanya melihat dampak dari sudut pandang ini). Evaluasi hasil ini berfokus pada perubahan yang terjadi.³⁵

Karena nama model CIPP di atas adalah komponen utama dari model lain, pembahasan ini tidak akan membandingkannya dengan model lain.

³³ R. Suryani, L., & Pratama, "Implikasi Model Evaluasi CIPP Secara Parsial Dan Komprehensif Pada Penilaian Program Publik," *Jurnal Manajemen Dan Evaluasi Organisasi*, 2023.

³⁴ Suryani, L., & Pratama.

³⁵ Suryani, L., & Pratama.

Seperti namanya, model ini terdiri dari empat jenis evaluasi yang berfungsi sebagai rangkaian keseluruhan. Dalam proses evaluasi, evaluator dapat melakukan satu jenis atau kombinasi dari dua jenis atau lebih; dengan kata lain, tidak selalu diperlukan untuk menggunakan keempat jenis tersebut. Namun, ini direkomendasikan karena model ini diharapkan.³⁶ Model ini bagus karena melakukan banyak hal untuk keempat jenis evaluasi. Bagan berikut ini menunjukkan keempat tugas evaluator.



³⁶ Pratiwi, N. L., & Rahmawati, "Penerapan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) Dalam Mengukur Efektivitas Program Organisasi."

2.2. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan informasi dari peneliti sebelumnya untuk membandingkan dan menilai kekurangan atau kelebihan mereka. Peneliti juga menggunakan informasi dari buku dan skripsi untuk mengetahui teori yang terkait dengan judul yang digunakan sebagai landasan teori ilmiah.

Penulis dan Tahun terbit	Kerangka Konseptual	Metode Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
Surryanto Djoko Waluyo (2025)	Analisis ekonomi politik (melihat dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan kesejahteraan sosial).	Studi kepustakaan (Kualitatif)	Analisis dokumentasi (mengacu pada data resmi pemerintah dan laporan lembaga terkait)	Kebijakan MBG berpotensi meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, namun menghadapi tantangan terkait keberlanjutan fiskal dan efektivitas distribusi.	E: Banda Aceh vs Nasional (Studi Umum) T: Efektivitas kebijakan lokal vs Kerangka umum ekonomi politik nasional P: Fokus pada efektivitas dan tantangan di tingkat kota (Banda Aceh) untuk mengisi kekosongan data spesifik lokal.

Winny Abdillah & Yusnanik Bakhtiar (2025)	Evaluasi kebijakan publik (tahapan perencanaan, evaluasi, dan pengawasan; faktor pendukung dan kendala).		Teknik analisis data kualitatif (analisis evaluatif implementasi)	Pelaksanaan MBG di SMA Negeri 2 Painan berjalan melalui tahapan perencanaan hingga pengawasan, tetapi menghadapi hambatan utama berupa keterbatasan sarana transportasi dalam distribusi makanan.	E: Banda Aceh vs SMA Negeri 2 Painan T: Analisis kebijakan tingkat kota vs Evaluasi di tingkat sekolah tertentu P: Penelitian di Banda Aceh memiliki cakupan lebih luas di tingkat kota yang mencakup berbagai institusi dan aktor.
Amalia Pratiwi, Stephani Widia Rianti Sipangkar, Adinda Nazla Rizky Ramadhani, Santi Mulyady, Muhammad Rayyan Hylmi, & Restu Rahmawati (2023)	Teori Mandat Hanna Pitkin (menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antar lembaga).	Studi Kualitatif / Analisis Teoritis	Analisis isi / deskriptif kualitatif berbasis kerangka teoritis	Transparansi, akuntabilitas, serta koordinasi antar lembaga dan pengelolaan yang efektif merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan Program MBG.	E: Banda Aceh vs Cakupan Nasional/Umum T: Evaluasi efektivitas lokal dan tantangan distribusi vs Analisis teoritis kerangka mandat Hanna Pitkin

					P: Penelitian di Banda Aceh mengkaji secara spesifik efektivitas lokal, hambatan distribusi, dan keberlanjutan program secara praktis.
Ahsan et al. (2026)	Pemenuhan kebutuhan dasar fisiologis (asupan gizi) dan korelasinya terhadap kesiapan fisik, konsentrasi, serta pencapaian akademik.	Pendekatan Evaluatif / Kuantitatif-Kualitatif	Analisis isi / deskriptif kualitatif berbasis kerangka teoritis	Program MBG memberikan dampak positif signifikan terhadap stabilitas kehadiran, motivasi belajar, dan hasil belajar akademik pada mata pelajaran yang butuh konsentrasi tinggi; namun dihadapkan pada tantangan variasi menu, konsistensi distribusi, dan sarana sekolah.	E: Banda Aceh vs Cakupan Sekolah/Umum (Ahsan et al.) T: Evaluasi kebijakan tata kelola & distribusi tingkat kota vs Dampak fisik-kognitif & capaian akademik siswa P: Penelitian berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan publik secara komprehensif di tingkat

					pemerintahan kota.
Rofita et al. (2025)	Kerangka CIPP (Context, Input, Process, Product) dalam evaluasi kesiapan fisik dan fungsi kognitif siswa.	Studi Evaluatif Kualitatif (Jenjang SMP)	Analisis komponen CIPP (Context, Input, Process, Product)	Program MBG relevan dengan kebutuhan belajar siswa dan meningkatkan konsentrasi serta motivasi kelas. Namun, dampaknya belum merata akibat kendala variasi menu, sarana distribusi, dan instrumen monitoring yang belum optimal.	E: Banda Aceh vs Jenjang SMP (Studi Rofita et al.) T: Efektivitas kebijakan publik secara menyeluruh di tingkat kota vs Evaluasi berbasis model CIPP pada jenjang SMP P: Berfokus pada dinamika efektivitas pelaksanaan dan tantangan kebijakan publik di skala perkotaan.

Sumber: Olahan Peneliti

Pemenuhan kebutuhan dasar fisiologis seperti asupan gizi memiliki korelasi erat terhadap kesiapan fisik, konsentrasi, dan pencapaian akademik peserta didik di sekolah. Berdasarkan penelitian Ahsan et al. (2026), intervensi melalui Program MBG terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan stabilitas kehadiran siswa, motivasi belajar, hingga capaian hasil belajar akademik pada mata Pelajaran yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Meskipun demikian, efektivitas implementasi program ini di lapangan masih diperhadapkan pada tantangan variasi menu, konsistensi distribusi, serta kesiapan sarana pendukung sekolah. Oleh karena itu, evaluasi komprehensif terhadap ketercapaian indikator kinerja program MBG penting untuk dilakukan guna memastikan keberlanjutan program dalam mendukung mutu Pendidikan nasional.³⁷

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan intervensi strategis pemerintah untuk mengoptimalkan Kesehatan fisik dan fungsi kognitif siswa dalam proses pembelajaran. Evaluasi berbasis kerangka CIPP (*context, input, process, product*) oleh Rofita et al. (2025) di jenjang Sekolah Menengah Pertama menunjukkan bahwa Program MBG sangat relevan dengan kebutuhan kesiapan belajar siswa serta terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan konsentrasi dan motivasi belajar di kelas. Namun demikian, studi tersebut juga menggaris bawahi bahwa dampak positif program belum sepenuhnya merata akibat kendala teknis, seperti variasi menu yang terbatas, keterbatasan sarana distribusi, serta instrument monitoring yang belum optimal.

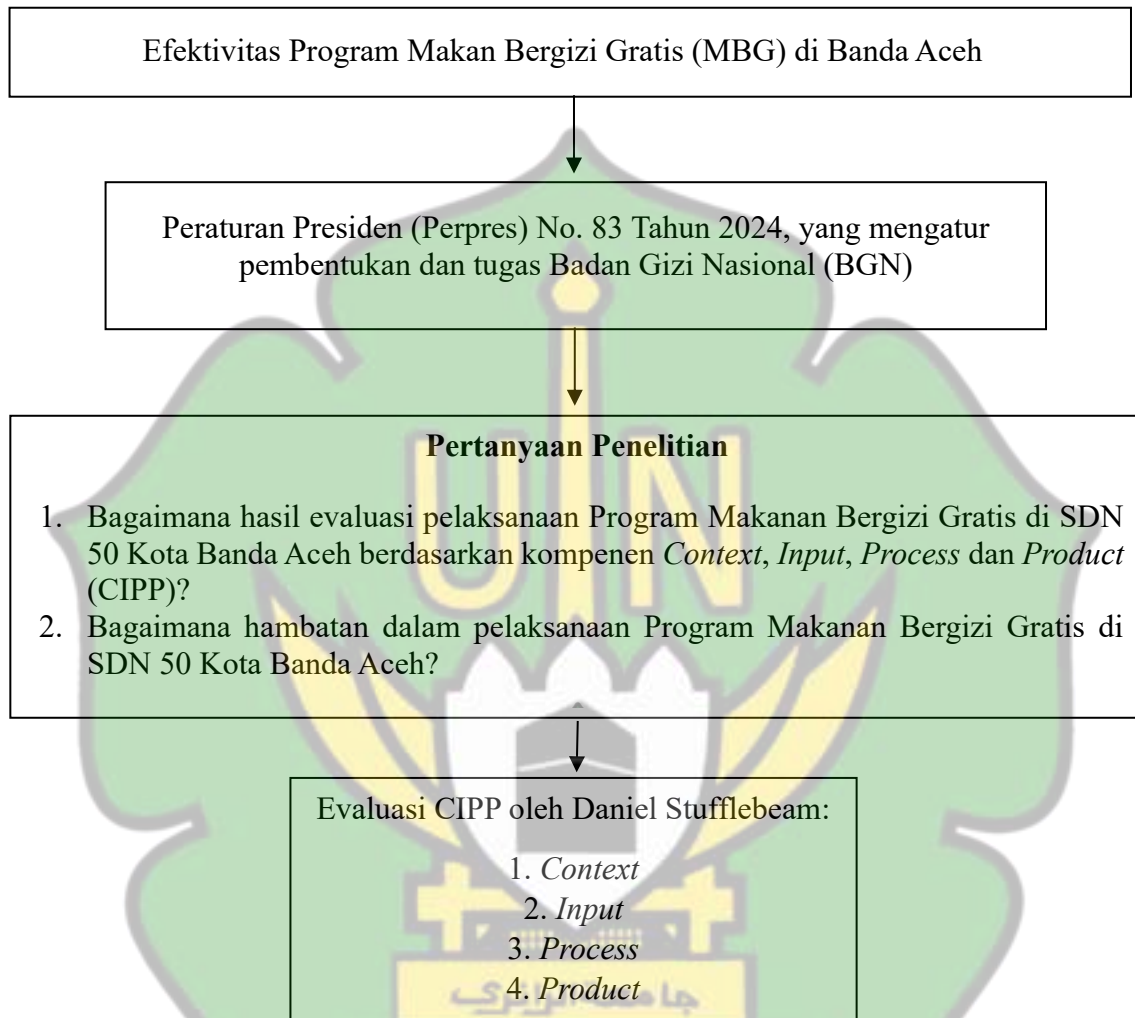
³⁷ Ahsan, J., A.T., Sibarani, C. G.G. T., Rambe, N. N., Nurnaziah, ariel, M., Metondang, K., & Fahlevis, A. (2026) Evaluasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Dampak pada Pendidikan. *EDUCATIONAL: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*

Oleh karena itu, diperlukan kajian dan evaluasi secara berkala guna memastikan efektivitas serta keberlanjutan pelaksanaan program MBG di lingkungan sekolah.³⁸

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran fokus dan pendalaman analisis dibandingkan studi sebelumnya. Jika penelitian terdahulu menyoroti kebijakan MBG pada tingkat nasional, lingkup sekolah tertentu, atau menekankan aspek teoritis seperti transparansi dan akuntabilitas, maka penelitian ini lebih menekankan pada efektivitas program MBG di Banda Aceh fokus penelitian diarahkan pada dinamika pelaksanaan program di Banda Aceh dengan melihat koordinasi antar lembaga, tantangan distribusi, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan program. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan MBG di Tingkat lokal serta menawarkan koontribusi praktis bagi penguatan pelaksana serta distribusi MBG di masa mendatang.

³⁸ Rofita, N. S., Ridariah, Anisa Natalia, Rosidin, U., & Handoko. (2025). Evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN X Pesawaran terhadap Konsentrasi dan Motivasi Belajar Peserta Didik. *INOMETIC: Jurnal Inovasi Dan Kajian Multidisiplineer Kontemporer*

2.3. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata, ungkapan, atau perilaku dari subjek penelitian. Fokus utamanya adalah menggali makna, memahami proses, serta menginterpretasikan konteks dari masalah yang diteliti, bukan mengukur secara numerik. Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat secara langsung di lapangan untuk melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sehingga mampu memperoleh gambaran utuh tentang realitas yang terjadi di lokasi penelitian. Metode ini dipilih karena topik penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Program Makan Bergizi gratis di SDN 50 Kota Banda Aceh memerlukan pemahaman mendalam terhadap proses efektivitas kebijakan, hambatan yang dihadapi, serta dinamika interaksi antara pelaksana kebijakan dan para pemangku kepentingan.

3.2. Fokus Penelitian

Tabel 2. Fokus Penelitian

Dimensi	Indikator	Sumber
Evaluasi kebijakan	1. <i>Context Evaluation</i> (Evaluasi Konteks) 2. <i>Input Evaluation</i> (Evaluasi Masukan)	Daniel Stufflebeam

	3. <i>Process Evaluation</i> (Evaluasi Proses) 4. <i>Product Evaluation</i> (Evaluasi Produk)	
--	---	--

Sumber: Olahan Peneliti

3.3. Lokasi Penelitian

Adapun pemilihan lokasi penelitian dilaksanakan oleh peneliti disebabkan karena:

1. Kondisi kehidupan masyarakat yang belum kondusif terhadap gizi yang dimiliki oleh anggota keluarga, maka dengan kearifan pemerintah melokalisir Kota Banda Aceh sebagai salah satu penerima MBG.
2. SPPG Banda Raya 1 menjadi Lokasi penelitian ini, dikarenakan pendistribusian SDN 50 berasal dari SPPG tersebut.
3. SDN 50 adalah Lokasi penelitian yang dipilih karena SDN 50 termasuk salah satu sekolah yang kedua menerima MBG di Banda Aceh dan juga salah satu sekolah yang memiliki jumlah siswa yang tergolong ramai.
4. Pemerintah menetapkan Perpres No. 83 tahun 2024 tentang pembentukan dan tugas BGN serta kerangka pelaksanaan program MBG secara nasional.

Sekolah telah ditetapkan peneliti sebagai salah satu sekolah sasaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Banda Aceh, sehingga relevan dengan fokus penelitian yang ingin mengkaji efektivitas program tersebut, sekolah ini memiliki jumlah peserta didik yang cukup representatif sehingga dapat memberikan data yang lebih komprehensif terkait penerimaan, distribusi, serta dampak pelaksanaan program MBG. Dengan demikian, penetapan SDN 50 Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian diharapkan mampu memberikan informasi empiris yang valid.

SPPG yang berlokasi pada gampong Banda Raya Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh terbagi menjadi 4 wilayah yaitu Lam Ara, Lhong Cut, Lamlagang 1 dan Lamlagang 2. Adapun SPPG yang akan menjadi objek penelitian adalah SPPG Lampagang Banda Raya 1 yang di mana wilayah kerja SPPG tersebut menaungi beberapa sekolah yaitu: PAUD Aluna Montessori, TK Pertiwi, SD Negeri 67 Percontohan, SD Negeri 50, SMP Negeri 7, dan SMA Negeri 7.

3.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung menghasilkan data kepada pengumpul data. Data diperoleh langsung oleh peneliti dari masyarakat atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggabungkan hasil dari wawancara yang diperoleh dari informan mengenai isu topik penelitian sebagai data primer.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung menghasilkan data kepada peneliti, seperti contohnya lewat artikel atau dokumen berkas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder berupa dokumen sesuai dengan pencatatan pada Sekolah Dasar 50 Kota Banda Aceh, jurnal, artikel, dan berita yang berkaitan dengan topik penelitian penerapan Program makanan bergizi gratis.³⁹

³⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), 194

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi Adalah metode pengumpulan data yang unik dan tidak terbatas pada orang saja tetapi juga hal hal lain. Ada dua jenis observasi yang berpartisipasi dan yang tidak berpartisipasi. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipatif dimana peneliti tidak langsung ikut terlibat dalam pengamatan tersebut (sugiono). Data yang didapatkan dapat berupa dokumentasi gambar, wawancara, mencatat, menganalisis, serta membuat kesimpulan terkait informasi yang didapatkan. Dalam hal ini observasi dilakukan untuk melihat bagaimana efektivitas Program Makanan Bergizi Gratis di SDN 50 Kota Banda Aceh.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, bertukar informasi, dan bertukar ide melalui tanya jawab. Jenis wawancara yang digunakan Adalah wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas. Dimana peneliti fokus pada topik penelitian secara keseluruhan dari pada menggunakan panduan wawancara yang disusun secara sistematis. Peneliti akan lebih banyak mendengarkan dan menganalisis setiap jawaban dari informan. Dengan demikian, peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan lanjutan yang lebih spesifik yang sesuai dengan tujuan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah terjadi. Pengumpulan data dengan teknik dokumen ini bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang ataupun lembaga tertentu sehingga penting untuk dipilah dokumen-dokumen yang memiliki kredibilitas tinggi. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa gambar, regulasi, dan berita yang disampaikan dari media atau media internet.

3.6. Informan Penelitian

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dapur SPPG Lamlagang Banda Raya 1	1
2	Petugas Lapangan SPPG Lamlagang Banda Raya 1	2
3	Kepala Sekolah SDN 50 Kota Banda Aceh	1
4	Guru SDN 50 Kota Banda Aceh	2
5	Wali Murid SDN 50 Kota Banda Aceh	5
6	Murid kelas 6 SDN 50 Kota Banda Aceh	5
Jumlah		16

Sumber: Olahan Peneliti

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh oleh peneliti dikerjakan serta dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil merupakan model analisis interaktif. Analisis data dilakukan dengan tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3.8. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas yang diteliti. Salah satu cara yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode pemeriksaan dan penetapan validitas data dengan menganalisisnya dari berbagai perspektif. Tujuannya ialah untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan dapat dipercaya dibandingkan apabila hanya menggunakan satu sumber atau satu metode saja.

Triangulasi pada dasarnya merupakan pendekatan multimetode, yaitu upaya menggabungkan beberapa sumber data, teknik pengumpulan data, atau waktu pengumpulan data yang berbeda agar kebenaran informasi dapat diuji secara menyeluruh. Menurut Nurfajriani, fenomena yang diteliti akan lebih dapat dipahami dengan baik dan menghasilkan kebenaran tingkat tinggi apabila dilihat dari berbagai sudut pandang.⁴⁰

⁴⁰ Wiyanda Vera Nurfajriani et al., "Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–827

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Pelaksanaan MBG di Kota Banda Aceh

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah yang diluncurkan secara nasional untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik dan kelompok rentan, juga untuk mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatkan kualitas kesehatan serta menurunkan angka stunting, dan membantu ekonomi masyarakat lokal dengan menjadi rantai suplai makanan: petani, nelayan, dan UMKM yang sesuai dengan kebutuhan MBG sehingga dapat terlibat sebagai penyedia bahan pangan. MBG saat ini menargetkan murid dari paud sampai SMK/SMA, termasuk juga ibu hamil dan menyusui serta balita. Dalam memastikan bahwa program berjalan dengan baik dan tepat sasaran harus dilakukannya audit program setiap tiga bulan sekali.

Di kota Banda Aceh, program ini mulai dilaksanakan secara serentak sejak 6 Januari 2025. Landasan pelaksanaan program MBG bertumpu pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 tahun 2024 yang menjadi acuan bagi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah. Secara keseluruhan di Kota Banda Aceh, terdapat 29 unit SPPG yang tersebar di 9 kecamatan untuk melayani ribuan peserta didik dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA.

Pelaksanaan MBG di Kota Banda Aceh secara umum telah berjalan dan menjangkau berbagai wilayah administrasi kota. Untuk melihat efektivitas operasional di lapangan, penelitian ini memfokuskan kajian pada SPPG Banda Raya Lamlagang dan SDN 50 Kota Banda Aceh sebagai salah satu sekolah penerima manfaat. SPPG Banda

Raya Lamlagang ini mengalokasikan kepada tiga sekolah yaitu SD Negeri 50, SMP Negeri 7, SMA Negeri 7, SDN 67 Percontohan Banda Aceh, PAUD Aluna Montessori, dan TK Pertiwi. Pembatasan objek penelitian ini dilakukan agar analisis yang dihasilkan lebih mendalam, terukur, serta mampu memberikan gambaran empiris yang representatif mengenai dinamika Evaluasi kebijakan di tingkat lokal. SDN 50 Kota Banda Aceh dipilih sebagai objek penelitian utama dengan beberapa pertimbangan strategis. Pertama, SDN 50 merupakan sekolah dasar kedua di Kota Banda Aceh yang dipercaya untuk menerima dan menjalankan program MBG. Kedua, sekolah ini memiliki jumlah peserta didik yang cukup besar, yaitu sebanyak 684 siswa, sehingga sangat representatif untuk mengukur efektivitas distribusi dan dampak pemenuhan gizi. Ketiga, karakteristik latar belakang sosial-ekonomi peserta didik di SDN 50 yang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu menjadikan sekolah ini sasaran yang sangat relevan sesuai dengan tujuan utama program MBG.

4.1.2. Pelaksanaan Kebijakan MBG di Kota Banda Aceh

Dalam konteks program MBG di SDN 50 Kota Banda Aceh, perencanaan terbukti telah disusun secara terstruktur melalui kolaborasi antara BGN, pihak SPPG Lamlagang, dan manajemen sekolah. Hal ini terefleksi dari beberapa poin teknis perencanaan:

Perencanaan data sasaran dan inklusivitas, kebijakan MBG di Kota Banda Aceh secara umum melibatkan koordinasi lintas sektor antara Badan Gizi Nasional (BGN), pengelola SPPG di tingkat gampong/kecamatan, serta pihak sekolah selaku penerima manfaat. Secara operasional, pembentukan dapur SPPG wajib memenuhi kriteria ketat dari BGN, di mana lokasi dapur ditentukan berdasarkan radius jarak (maksimal 5 km) dan ketersediaan populasi siswa di sekolah sekitar. Dapur SPPG berfungsi layaknya

produsen/penjual, sedangkan sekolah bertindak sebagai penerima manfaat/pembeli. Jika target kuota penerima di suatu titik kecamatan belum terpenuhi (misalnya target 2.000 penerima manfaat), maka dapur diperbolehkan mengambil jangkauan sekolah di luar kecamatan terdekat.

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 50 Kota Banda Aceh merupakan salah satu sekolah penerima manfaat utama program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dilayani oleh SPPG Lamlagang. Sekolah ini berlokasi di wilayah pekotaan Kota Banda Aceh dengan karakteristik peserta didik yang cukup beragam, dimana mayoritas siswa berasal dari keluarga dengan status social ekonomi menengah ke bawah.

Pada tahun ajaran berjalan, SDN 50 Kota Banda Aceh memiliki total sasaran penerima manfaat sebanyak 684 siswa yang terbagi ke dalam kelas bawah (Kelas I, II dan III) serta kelas atas (IV, V dan VI). Untuk mendukung kelancaran distribusi MBG di lingkungan sekolah, pihak sekolah membentuk tim pelaksana internal yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan menunjuk beberapa guru sebagai *Person in Charge* (PIC) MBG. PIC sekolah bertugas mengelola presensi harian penerima manfaat, melakukan pendataan alergi murid, memfasilitasi proses distribusi porsi setiap kelas, serta memimpin prosedur pengawasan mutu mandiri melalui uji organoleptic sebelum makanan dibagikan kepada peserta didik.

Pada tahap pelaksanaan Program MBG di SDN 50 Kota Banda Aceh, tindakan kolektif dari berbagai bidang organisasi pelaksana MBG (SPPG, armada logistic, PIC Sekolah, dan Guru) bergerak selaras dengan rencana dan SOP yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan MBG di SPPG Bandar Raya Lamlagang yang melayani SDN 50 Kota Banda Aceh telah mengacu pada penjadwalan dan standar operasional yang baku.

Distribusi makanan dari dapur SPPG Lamlagang menuju SDN 50 berjalan relative lancar karena jarak lokasi dapur dan sekolah yang berdekatan. Dalam proses pengiriman, SPPG didukung oleh dua unit armada mobil operasional (kapasitas 800-1000 ompreng per mobil) sehingga estimasi makanan tiba di SDN 50 tepat waktu, yakni antara pukul 08.00-09.00 WIB, sebelum jam istirahat sekolah (pukul 09.30/10.00 WIB).

Gambar 1. Pembagian MBG Kepada Murid SDN 50 Kota Banda Aceh



Sumber: Dokumentasi SDN 50 Kota Banda Aceh

Tahapan evaluasi kebijakan merupakan langkah krusial untuk mengukur tingkat keberhasilan dan dampak yang dirasakan oleh siswa dan masyarakat dari program MBG. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kesesuaian antara perencanaan awal, ketersediaan sumber daya, proses pelaksanaan, hingga dampak yang dirasakan langsung oleh penerima manfaat (siswa, ibu hamil dan menyusui serta balita).

Untuk mengevaluasi efektivitas Evaluasi kebijakan ini, penelitian menggunakan pendekatan Model Evaluasi CIPP (*context, Input, Process, Product*) oleh Stufflebeam.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala SPPG Lamlagang, Ahli Gizi, Karyawan SPPG, Kepala SDN 50 Banda Aceh, Guru, Wali Kelas, Wali Murid dan Murid SDN 50 Banda Aceh.

Proses Evaluasi kebijakan dan evaluasi program merupakan dua tahapan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam analisis kebijakan public. Indikator-indikator Evaluasi seperti perencanaan dan pelaksanaan menyediakan gambaran mengenai bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan. Untuk menilai sejauh mana Evaluasi tersebut berjalan secara efektif, kompreherensif, dan tepat sasaran, indikator-indikator Evaluasi tersebut perlu diintegrasikan ke dalam kerangka Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Integrasi ini memungkinkan peneliti untuk membedah tidak hanya proses pelaksanaannya (*process*), tetapi juga kesesuaian latar belakang kebijakan (*Context*), kesiapan sumber daya (*input*), hingga dampak nyata yang dihasilkan (*product*). Analisis integrasi Evaluasi kebijakan ke dalam model CIPP dipaparkan sebagai berikut:

Evaluasi dilakukan secara komprehensif melalui empat indikator utama yaitu sebagai berikut:

4.1.2.1. Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

Evaluasi konteks menilai latar belakang, kebutuhan, dan kesesuaian program dengan kondisi penerima manfaat apakah berhasil atau tidaknya Evaluasi program ini. Evaluasi konteks berfokus pada landasan kebijakan, kesesuaian program dengan kebutuhan riil peserta didik, serta pemetaan masalah lingkungan sekolah.

Yang pertama yaitu melihat landasan kebijakan dan legalitas, Evaluasi MBG secara nasional berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi

Nasional. Di tingkat daerah Kota Banda Aceh, program ini diterjemahkan melalui mandate operasional SPPG Lamlagang untuk memnuhi kebutuhan nutrisi anak usia sekolah guna menekan angka *stunting* dan pemenuhan gizi seimbang.

Kedua, kebutuhan nutrisi dan kondisi social siswa, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 50 Kota Banda Aceh, program MBG dinilai sangat tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang signifikan. Melihat banyaknya peserta didik di SDN 50 berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga pemenuhan nutrisi harian menjadi kebutuhan vital. Kehadiran program MBG terbukti meningkatkan semangat dan konsentrasi belajar anak-anak di kelas setelah mengkonsumsi makanan bergizi.

Hal ini didukung oleh penuturan ahli gizi mengenai relevansi Program terhadap kondisi ekonomi siswa:

“kalau menurut saya MBG itu bagus sih, karena kalau misalnya orang kurang mampu, di saat waktu siangnya kan dia dapat nasi, tidak perlu lagi bawa bekal dari rumah. Jadi semenjal adanya MBG itu, kebanyakan anak-anak lebih dapat manfaatnya.”⁴¹

Selain itu, pihak sekolah dan SPPG melakukan kesepakatan tertulis (MoU) yang mengatur hak, kewajiban, serta penanganan jika terjadi kendala operasional seperti ompreng yang hilang atau kekurangan porsi dan juga memastikan bahwa semua murid mendapatkan MBG. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah SDN 50 “Pemanfaatan MBG di sd 50 berjalan dengan baik tanpa ada kendala, semoga kedepannya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”.⁴²

⁴¹ Wawancara dengan pakar gizi, tanggal 30 Agustus 2026

⁴² Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 50 Kota Banda Aceh, di SDN 50 Banda Aceh, tanggal 27 Juli 2026

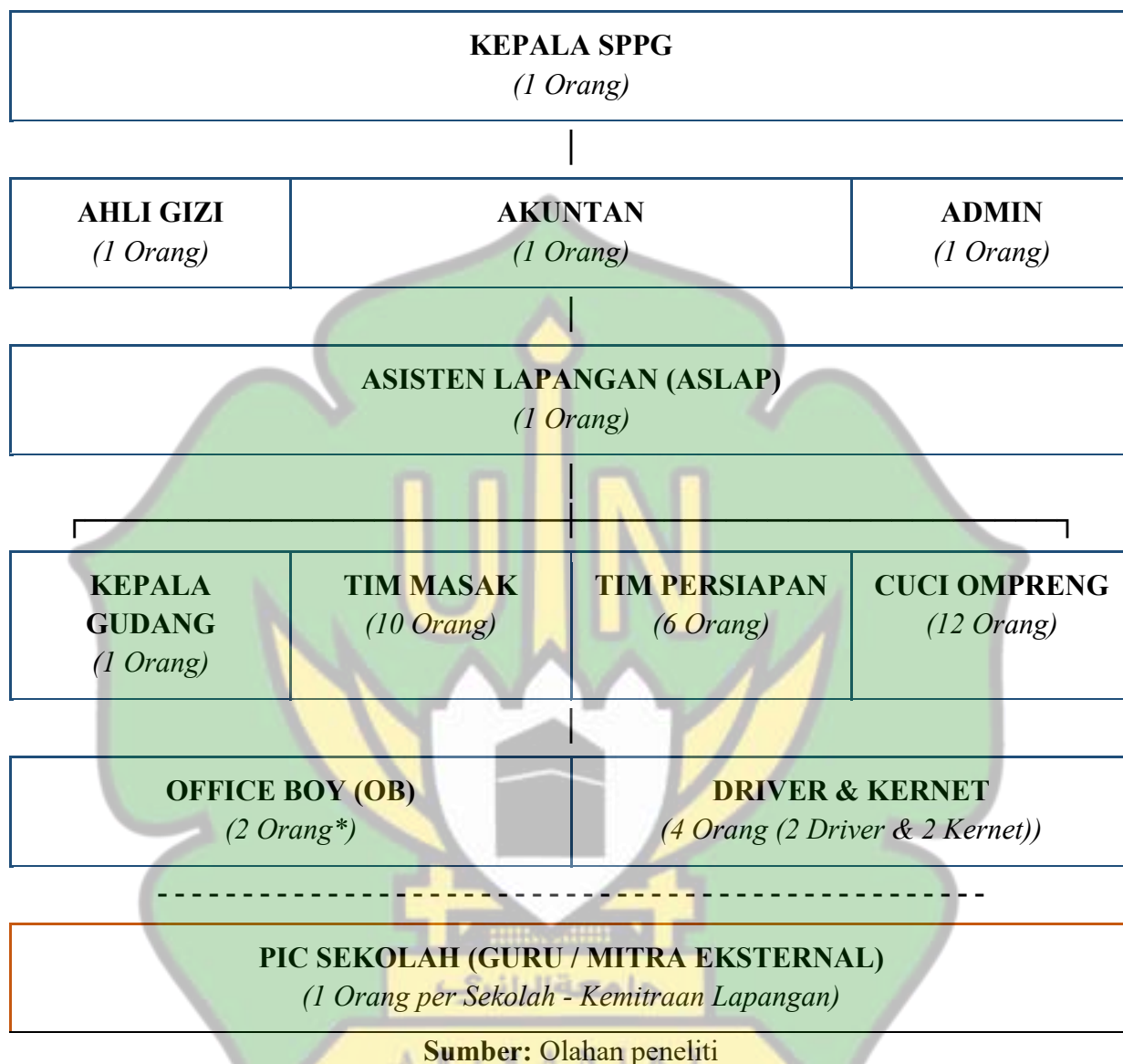
Adapun pertama kali adanya SPPG di Aceh yaitu yayasan yang di mana pada awalnya mereka mengajukan proposal ke Badan Gizi Nasional. Pada awalnya pembangunan dan biaya untuk belanja kebutuhan dapur semua itu menggunakan uang pribadi atau uang yang sudah disetujui proposalnya. Dan pada saat pembangunan banyak syarat yang harus dipenuhi dan mengikuti standar BGN sebagaimana yang sudah ditentukan oleh mereka. SPPG sendiri juga memiliki ketentuan dalam kapasitas SDM atau para pekerja yang akan bekerja di SPPG tersebut, apabila kekurangan orang maka harus ditambah agar kinerjanya tetap terjaga dan berkualitas. Seperti yang disampaikan oleh asisten lapangan SPPG:

“Untuk target porsi sekitar 2500 itu masing-masing divisi 12 orang, dan itu sudah sangat cukup untuk karyawan dan target untuk penerima manfaat 2500. Lebih dari 2500 atau mendekati 3000 itu harus menambah karyawan agar kerjanya lebih maksimal dalam menangani program MBG dan tidak keteran”.⁴³

Penyesuaian jumlah Tenaga Kerja/Sumber Daya Manusia (SDM) pada SPPG ini merupakan bentuk pemenuhan terhadap standar operasional yang ditetapkan oleh BGN guna memastikan efisiensi pengelolaan, distribusi, serta kualitas porsi makanan yang disajikan. Berdasarkan struktur tata kelola operasional di lapangan, hierarki kepemimpinan, pembagian peran teknis, hingga skema koordinasi dengan pihak penerima manfaat (sekolah) ditetapkan ke dalam struktur organisasi. Adapun gambaran struktur organisasi dan distribusi alokasi SDM pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

⁴³ Wawancara dengan Asisten Lapangan SPPG di Lamlagang, tanggal 01 Agustus 2026



Catatan Keterangan:

1. Garis Tegas (—): Menunjukkan hubungan komando dan koordinasi operasional internal SPPG.
2. Garis Putus-putus (- - -): Menunjukkan hubungan koordinasi kemitraan eksternal antara SPPG dan Pihak Sekolah.
3. (*) Jumlah tenaga Office Boy (OB) dapat disesuaikan secara fleksibel berdasarkan skala kebutuhan dan luas area operasional dapur SPPG.

Berdasarkan pembagian struktur organisasi dan tata Kelola SDM di atas, keberadaan koordinasi yang terstruktur antara pimpinan teknis, tim produksi dapur, hingga armada distribusi menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adanya kejelasan pembagian peran serta fleksibilitas penambahan alokasi tenaga kerja sesuai skala rasio penerima manfaat memastikan bahwa standar hygiene, efisiensi waktu dan mutu gizi tetap terjaga secara konsisten di lapangan.

4.1.2.2. Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)

Evaluasi masukan mencakup ketersediaan sumber daya manusia (SDM), struktur organisasi, ketersediaan bahan pangan, serta fasilitas pendukung. Dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lamlagang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang terdiri dari Kepala SPPG, didampingi oleh Kepala Ahli Gizi, Akuntan, Asisten Lapangan (ASLAP), serta tim teknis yang terdiri dari Kepala Gudang, Tim Masak, Tim Cuci Ompreng, Tim Kebersihan dan Driver.

Keberadaan tenaga ahli gizi menjadi elemen *input* vital dalam menjamin mutu dan keamanan hidangan. Ahli gizi bertanggung jawab penuh merencanakan dan Menyusun standar gizi serta takaran kalori berdasarkan kelompok umur peserta didik. Sebagaimana di sampaikan oleh ahli gizi:

”peran ahli gizi itu memang dari pertama perencanaan semua ditata dari awal, insya allah kalau misalnya dia *basic* gizi, engga akan ada salah. Cara memastikannya, kita perlu tahu dulu sasarannya ke siapa, lalu kita hitung kebutuhannya sekitar 2000 kalori. Kalau tk ada ukuran takarannya sendiri, sd ada katarannya sendiri, hingga Sma dan ibu hamil pun juga berbeda-beda. Jadi sudah terbagi bagi berdasarkan perkiraan umur penerima”⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan pakar gizi, tanggal 30 Agustus 2026

Tetapi dalam tahap evaluasi, masukan ini di temukan catatan kritis terkait kualifikasi SDM gizi di beberapa unit dapur penyiapan secara umum. Ahli gizi mengungkapkan pentingnya standarisasi latar belakang Pendidikan pengelola gizi:

“sangat penting keterlibatan ahli gizi karena ini memang program terkait gizi. Tapi sekarang banyak yang di bidang itu bukan gizi lagi basic nya, apa saja boleh yang penting tamatan s1 atau D3 di setiap dapur. Padahal kalau basic nya gizi perencanaan gizi dan higienitasnya akan lebih terjamin.”

Adapun ketersediaan anggaran operasional MBG dialokasikan penuh dari BGN melalui SPPG Lamlagang. Peralatan masak skala besar, *food stray* standar konsumsi dan kendaraan distribusi termal telah dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan gizi SPPG lamlagang memiliki supplier sendiri adapun keterlambatan supplier dalam memberikan kabar terkait ketersediaan bahan baku itu menjadi hambatan besar dalam mempersiapkan makanannya. Seperti yang disampaikan oleh karyawan SPPG:

“Supplier telat ngabarin kadang bahan baku di hari H tidak ada. Seperti contoh buah salak tidak ada Jadi telat mengabari H-1, jadi harus ada persiapan untuk mengganti menu buah, bisa jadi buah pisang gitu. Kadang kalau bahan baku terlalu tinggi, kami mencari supplier lain. Dan misal di supplier tidak ada bahan baku, jadi kami bisa mengganti supplier telatnya kabarin supplier itu yang menjadi hambatan buat mengubah menu yang sudah di tentukan MBG”.⁴⁵

Perencanaan Nutrisi dan Bahan Baku ditangani oleh ahli gizi dari setiap SPPG, dan setiap ahli gizi mereka harus memiliki latar belakang pendidikan gizi dan mereka akan melewati tahapan tes. Sebelum menu disajikan, ahli Gizi SPPG memperhitungkan gramasi dan kandungan nutrisi secara ketat, dan sebelum membagikan MBG ke setiap sekolah ada asisten lapangan yang turun ke sekolah untuk meminta data terkait makanan

⁴⁵ Wawancara dengan Karyawan SPPG di Lamlagang, tanggal 01 Agustus 2026

yang bisa dikonsumsi atau tidak oleh muridnya sehingga pada saat pembagian MBG semua murid mendapat MBG tanpa terkecuali.

Jadi untuk setiap tingkat Sekolah dari posyandu, paud, tk, sd, smp, dan sma, memiliki standar minimal persen yang akan di bagikan di setiap Sekolah. Agar setiap makanan yang di berikan tercapai tujuan dengan tepat, dikarenakan juga berat timbangan setiap anak berbeda.

Data yang di dapat terkait makanan yang diminati anak-anak, pantangan anak-anak terhadap suatu makanan seperti adanya alergi, dan pada saat pendataan diminta surat keterangan dokter bahwasannya benar adanya hal tersebut. Jadi data yang didapat lebih akurat sehingga penyaluran MBG tetap dapat berjalan. Hal ini didapatkan dari hasil wawancara dengan asisten lapangan yang mendata langsung yang menyampaikan:

“Kami sebelum membagikan MBG kami harus menjumpai kepala sekolah untuk perizinan dan membuat perjanjian lalu baru kami bekerjasama dengan PIC dia ni *Person in Charge* fungsinya untuk menjadi penghubung antara sekolah sama MBG, guru tu yang bantu mendata lalu kirim sama aslap nya biar di sampaikan ke bagian gizi SPPGnya”.⁴⁶

Hambatan *input* yang kerap terjadi adalah keterlambatan laporan dari *supplier* bahan baku pada H-1 atau hari H (seperti ketersediaan buah segar). Jika bahan baku tidak ada atau harganya terlalu tinggi, pihak dapur melakukan substitusi menu (misalnya mengganti buah salak dengan pisang) atau beralih ke *supplier* alternative yang dimana setiap SPPG pasti menyediakan *supplier* cadangan untuk jaga-jaga apabila *supplier* pertama tidak ada bahan baku. Tetapi bukan dalam artian selalu menggunakan *supplier* pertama. *Supplier* akan bergantian menyediakan bahan pokok untuk SPPG. Dan untuk saat sekarang ini *supplier* ditentukan oleh yayasan yang menaungi SPPG tersebut dan

⁴⁶ Wawancara dengan Asisten Lapangan SPPG di Lamlagang, tanggal 01 Agustus 2026

membuat perjanjian MoU terkait barang yang dikirim dan penanggung jawaban bahan baku yang di kirim, dan hal ini menjadi pertanggung jawaban dari kepala gudang. seperti yang disampaikan oleh informan SPPG:

“Kepala gudang untuk mengecek setiap bahan masuk dari supplier fungsinya kepala gudang itu melihat barang masuk barang keluar dan mengecek barang yang sampai dan disitu kita bisa mengetahui sayur ini layak untuk dipakai atau tidak buah ini layak atau tidak dan itu sudah pasti sebelum masuk ke dalam dapur, kepala gudang selalu mengecek dan kalau barang tidak sesuai dengan yang permintaan dapur, itu pasti dipulangkan dan itu sudah ada perjanjian dengan supplier berdasarkan MOU nya sendiri juga hal ini untuk mencegah kontaminasi”.⁴⁷

Adapun dari pihak sekolah menyediakan fasilitas dan uji kelayakan. Di pihak sekolah, SDN 50 menyediakan tempat khusus pembagian makanan. Mereka menyediakan meja sehingga pada saat driver menurunkan ompreng dari mobil mereka langsung turunkan di tempat yang telah disediakan, sehingga pada saat jam pembagian para guru wali kelas dan perwakilan dari siswa kelas 4 sampai kelas 6 sesuai jadwal piket untuk mengambil ompreng dan dibagikan kepada teman sekelasnya. Hal ini disampaikan oleh kepala sekolah SDN 50 yaitu, “Penyediaan tempat mbg disediakan dari pihak sekolah, dan dibagikan saat jam istirahat”.⁴⁸

Gambar 2. Tempat penurunan ompreng

⁴⁷ Wawancara dengan Informan SPPG di Lamlagang, tanggal 01 Agustus 2026

⁴⁸ Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 50 Kota Banda Aceh, di SDN 50 Banda Aceh, tanggal 27 Juli 2026



Sumber: Olahan peneliti

Sebelum makanan dibagikan kepada murid, pihak sekolah menjalankan standar pengujian berupa Uji Organoleptik (menilai rasa, warna, aroma, dan tekstur dengan rating 1-5). Setiap hari guru yang menerima ompreng harus mencoba makanan tersebut layak atau tidaknya untuk di makan oleh siswa sd 50, jika ada kendala atau hal yang lain maka dapat dikatakan langsung pada pihak MBG-nya. Adapun hasil yang bagus dari uji tersebut menunjukkan bahwa makanan dari SPPG Lamlagang senantiasa memenuhi standar kelayakan dan tidak pernah mengalami kebasian atau bau. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh kepala sekolah SDN 50:

“Pihak sekolah mengadakan uji coba terlebih dahulu kepada MBG, sebelum diberikan kepada murid-murid, yaitu uji organoleptic. Hal ini untuk mengetes kelayakan makanan untuk dimakan oleh murid. Dengan cara mengisi kuesoner, dengan 4 penilaian yaitu berdasarkan (rasa, warna. Aroma, tekstur) dengan rating 1-5. Lalu, dari hasil penelitian sekolah menunjukkan bahwa mbg layak untuk dikonsumsi karena penilaiannya bagus semua”⁴⁹

Penerapan uji organoleptic secara berkala ini menjadi bukti nyata adanya skema *quality control* dan mitigasi risiko keamanan pangan yang efektif dalam pelaksanaan

⁴⁹ Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 50 Kota Banda Aceh, di SDN 50 Banda Aceh, tanggal 27 Juli 2026

Program MBG. Melalui verifikasi langsung oleh pihak sekolah selaku garda terdepan penerima manfaat, tingkat kelayakan gizi dan kebersihan makanan dapat terus terpantau. Konsistensi hasil penilaian yang memuaskan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan SPPG Lamlagang terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) BGN, tetapi juga berhasil membangun rasa aman dan kepercayaan bagi para siswa serta orang tua murid.

4.1.2.3. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Evaluasi proses berfokus pada pelaksanaan harian, kepatuhan terhadap SOP, koordinasi, serta penanganan kendala di lapangan. Kepatuhan SOP SPPG Lamlagang mewajibkan seluruh karyawan dapur SPPG wajib mengikuti *briefing* sebelum melakukan pekerjaannya untuk mempermudah pekerjaan dan pembagian tugas dalam setiap bidang seperti memasak, cuci ompreng, packing, driver dan rapat rutin mengenai SOP kerja di masing-masing bidang (pencucian ompreng, pemorsian, hingga pengantaran)

Dan dari pihak sekolah mekanisme koordinasi & penanganan alergi kepala sekolah menunjuk seorang *Person in Charge* PIC untuk berkoordinasi secara intensif dengan SPPG melalui grup *chat*. Data siswa yang tidak hadir atau memiliki toleransi alergi terhadap makanan tertentu didata oleh PIC berdasarkan surat keterangan wali murid selain itu mereka juga bertanggung jawab untuk memantau pembagian dan pengembalian ompreng ke pihak SPPG dan mereka juga di gaji oleh SPPG berdasarkan jumlah murid yang ditangani. Dan pihak SPPG juga merespon secara cepat dengan memberikan dispensasi menu khusus bagi siswa yang memiliki alergi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh kepala sekolah SDN 50:

“Dari pihak SPPG juga meminta data siswa yang memiliki toleran elergi terhadap beberapa makanan, dengan cara pihak wali murid memberi keterangan, lalu dikirimkan ke PIC sekolah dan diteruskan ke pihak SPPG, maka pihak SPPG akan mengadakan dispensasi bagi siswa yang memiliki alergi terhadap menu yang diberikan”.⁵⁰

Untuk siswa yang terdapat alergi maka akan di berikan menu yang berbeda dari temen yang lain karena adanya dispensasi bagi siswa/siswi yang ada alergi, sehingga semua murid dapat MBG. Salah satu kendala di lapangan sempat terjadi pada awal bulan Ramadhan Tahun 2026, dimana terdapat ketidaksesuaian jumlah ompreng yang dikirim dengan jumlah siswa di sekolah. Namun, berkat koordinasi yang sigap antara PIC sekolah dan pengawas dari SPPG, permasalahan dapat segera diatasi.

Selain itu, evaluasi proses juga mencakup pemantauan sisa makanan pada ompreng yang di kembalikan oleh siswa. Tim gizi memanfaatkan data sisa makanan (*plate waste*) ini sebagai bahan evaluasi perbaikan menu. Sebagaimana dijelaskan oleh ahli gizi:

“Kalau misalnya setelah ompreng di bagikan dan di balikin ada banyak sisa makanan, terutama seperti sayur atau bahan tertentu, dari pihak gizi akan mengambuk debgan menyesuaikan lagi menu nya di hari berikutnya agar cocok dengan selera anak anak.”⁵¹

Secara keseluruhan, dinamika dan penyesuaian di lapangan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh proses produksi di dapur SPPG, melainkan juga oleh kepekaan terhadap kebutuhan khusus siswa serta efektivitas komunikasi antara tim pengawas dan pihak sekolah. Dengan adanya skema dispensasi

⁵⁰ Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 50 Kota Banda Aceh, di SDN 50 Banda Aceh, tanggal 27 Juli 2026

⁵¹ Wawancara dengan pakar gizi, tanggal 30 Agustus 2026

alergi dan penyelesaian masalah logistic yang sigap, kualitas pelayanan dan kepuasan penerima manfaat dapat terus terjaga secara optimal.

4.1.2.4. Evaluasi Hasil (*Product Evaluation*)

Evaluasi hasil mengukur tingkat pencapaian tujuan dan dampak dari program. Adapun dampak yang didapatkan oleh siswa penerima MBG dari segi kesehatannya dan akademis pelaksanaan MBG di SDN 50 Kota Banda Aceh secara umum berjalan dengan sangat baik. Dengan adanya koordinasi yang baik antar pihak SPPG dan sekolah program ini berhasil memenuhi ketersediaan gizi harian siswa tanpa menimbulkan masalah kesehatan (seperti keracunan makanan).

Hal ini juga didukung oleh adanya koordinasi yang bagus antara pihak sekolah dengan SPPG Lamlagang dengan mendata terlebih dahulu makanan yang dapat diterima siswa dan yang tidak dapat diterima seperti adanya alergi atau pantangan terhadap suatu makanan. Karena keracunan makanan tidak hanya disebabkan oleh makanan yang tidak layak tetapi dari respon tubuh terhadap makanan tertentu juga dapat menyebabkan seorang siswa keracunan makanan. Oleh sebab itu koordinasi antara sekolah dan SPPG harus berjalan dengan baik dan juga cepat tanggap.

Adapun Peningkatan Kualitas Belajar berdasarkan hasil observasi dan penerimaan program menunjukkan peningkatan energi, ketahanan fisik, dan fokus belajar siswa selama proses pembelajaran di sekolah. Keseluruhan indikator keberhasilan ini menegaskan bahwa program MBG di SDN 50 Kota Banda Aceh memberikan dampak positif yang nyata terhadap efektivitas pembelajaran dan pemenuhan gizi anak hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan yang di lakukan setiap bulannya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh karyawan SPPG:

“Diketahui dan kalau untuk anak sekolah itu ada ditimbang berat badan tiap bulan, ada dihitung tinggi badan mereka sebulan sekali. Itu akan pasti diminta data ke sekolah. Sekolah akan menyiapkan data itu dan posyandu akan menyiapkan data yang tepat. Dan datanya juga di minta oleh SPPG agar tahu apakah terdapat anak yang stuntingkah? Disitu bisa melihat gizinya disitu menghitung gizi kalau dilihat dari data emang datanya gak banyak perubahan paling tidak emang adalah berubah datanya sedikit dan itu tidak banyak kalau dihitung persen ya paling naik datanya setiap bulan ya 2% 3%”.⁵²

Mengenai sejauh mana MBG dapat meningkatkan status gizi anak secara signifikan, ahli gizi memberikan analisis yang *realistis* terkait frekuensi pemberian makanan yang hanya di lakukan satu kali sehari pada jam sekolah:

“apakah berpotensi meningkatkan status gizi? Sebenarnya kalau kita lihat dari sekali di kasih makan sehari, peningkatan nya bertahap dalam jangka waktu yang agak lama, karena MBG ini kan di kasih cuma waktu makan siang saja (sekali sehari). MBG ini bukan hanya prioritas untuk orang kurang mampu, tapu untuk semua siswa. Namun bagi anak dari keluarga yang kurang mampu, intervensi sekali sehari ini sangat membantu memenuhi kecukupan gizi harian mereka.”⁵³

Meskipun kenaikan tersebut terlihat gradual, secara medis pergerakan ini sangat bermakna dalam jangka panjang until mencegah kegagalan pertumbuhan (*stunting*) serta meningkatkan fungsi kognitif anak. Hal ini memperkuat teori efektivitas organisasi dari Richard M. Steers, yang menyatakan bahwa efektivitas tidak hanya diukur dari tercapainya target jumlah *output* (kuantitas ompreng), melainkan dari seberapa jauh output tersebut mampu memberikan perubahan positif pada taraf hidup penerima sasaran (*outcome & impact*).⁵⁴

⁵² Wawancara dengan Karyawan SPPG di Lamlagang, tanggal 01 Agustus 2026

⁵³ Wawancara dengan pakar gizi, tanggal 30 Agustus 2026

⁵⁴ Rini Aristin et al., “Efektivitas Organisasi Dalam Perspektif Model Richard M Steers Di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang” 7, no. 1 (2022): 63–72.

Berdasarkan hasil observasi serta penuturan pihak pengelola program di lapangan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 50 Kota Banda Aceh tidak hanya berkontribusi langsung pada peningkatan fokus dan ketahanan fisik siswa di kelas, melainkan juga menyediakan instrumen evaluasi kesehatan secara berkala. Adanya pemantauan rutin terhadap indikator antropometri seperti berat dan tinggi badan yang terintegrasi antara pihak sekolah, posyandu, dan SPPG menunjukkan bahwa dampak intervensi gizi ini terpantau secara empiris dan bertahap meskipun kenaikan persen indikator fisik terjadi secara gradual (berkisar 2% hingga 3 setiap bulannya), tren positif yang konsisten ini membuktikan bahwa keberlanjutan program MBG bedaya guna dalam menekan risiko stunting sekaligus mengoptimalkan kualitas pemenuhan gizi anak sekolah dasar.

4.1.2.5. Implikasi Teoritis dan Praktis Administrasi Publik

Temuan dari penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan terhadap studi kebijakan publik dan administrasi Negara. Dalam kerangka Third Generation Policy Implementation Research, keberhasilan Evaluasi program sangat ditentukan oleh jaringan kerja sama yang era tantara jaringan birokrasi sentral dengan actor pelaksana lokal (*bottom up governance*).

Secara praktis, model Evaluasi di Banda Aceh menawarkan skema kerja sama ideal Antara SPPG (selaku unit produksi) dan sekolah (selaku unit penerima):

- a. Keberadaan *Person in Charge (PIC)* sekolah, menjadi jembatan komunikasi real-time melalui grup pesan singkat untuk memperbarui data presensi harian siswa.

- b. Mitigasi inklusif, adanya pemberian dispensasi menu alergi membuktikan bahwa birokrasi pelayanan public dapat bersikap humanis dan fleksibel, tidak semata-mata terpaku pada rigiditas aturan porsi massal.
- c. Penyediaan armada khusus, adanya penggunaan dua unit mobil thermal khusus dengan kapasitas 800-1000 omprong memastikan makanan tiba dalam kondisi hangat dan higienis. Oleh karena itu, tantangan integrasi rantai pasok dan keterlembatan konfirmasi supplier yang ditemukan dalam penelitian ini hendaknya dijadikan bahan perbaikan untuk masa depan. Penguatan digitalisasi system inventaris (*e-procurement*) antara SPPG dan penyedia bahan lokal perlu di bangun agar prediksi stok bahan makanan dapat diketahui secara akurat pada H-produksi, sehingga perubahan menu yang mendadak tidak lagi terjadi.

4.2. Pembahasan Penelitian

Pembahasan penelitian ini berfokus pada temuan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Banda Aceh melalui kerangka evaluasi CIPP, yang terdiri atas evaluasi konteks, masukan, proses, dan hasil. Secara umum, program MBG yang dinilai sebagai inisiatif strategis nasional ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik, khususnya pada anak sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga relevan jika di tingkat lokal program menjadi instrumen pemenuhan kebutuhan nutrisi harian karena di saat kondisi ekonomi yang sekarang tidak semua keluarga dapat mencukupi gizi untuk anaknya.

Konteks pelaksanaan MBG di Banda Aceh menunjukkan kesesuaian yang kuat antara tujuan program dan karakteristik sasaran. Berdasarkan hasil wawancara kepala

sekolah SDN 50, MBG dinilai tepat sasaran karena sebagian besar peserta didik berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga pemenuhan nutrisi harian menjadi kebutuhan yang vital, serta MBG membuat siswa menjadi semangat dan konsentrasi belajar setelah mengonsumsi makanan bergizi. Temuan ini memperkuat pandangan teori kebijakan publik bahwa efektivitas suatu program berbanding lurus dengan derajat relevansi masalah yang dihadapi oleh masyarakat penerima manfaat. Kehadiran MBG di lokasi penelitian tidak sekedar berfungsi sebagai bantuan sosial, melainkan sebagai bentuk pemenuhan hak dasar anak atas nutrisi layak guna mendukung pembentukan kualitas sumber daya manusia sejak dini dan dapat mengurangi angka stunting.

Dari sisi landasan kebijakan, Evaluasi MBG di Banda Aceh mulai dilaksanakan secara serentak sejak 6 Januari 2025, dengan rujukan Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Dalam kerangka ini, BGN berperan sebagai acuan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa pelaksanaan di tingkat lokal tidak berdiri sendiri, melainkan mengikuti struktur tata kelola nasional melalui BGN. Setiap SPPG yang ingin membuka dapur mereka harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang ada. Tidak bisa seenaknya saja dalam membangun SPPG karena salah satunya adalah memenuhi syarat banyaknya pembagian MBG ke sekolah. Seperti yang telah dijelaskan bahwasannya setiap dapur harus mencapai 2500-3000 pembagian MBG setiap harinya. Jika satu dapur tidak mencapai target tersebut maka dapur itu harus tutup.

Adapun dilihat dari hasil penelitian berdasarkan empat indikator pada evaluasi masukan (*input*), struktur organisasi SPPG Lamlagang memperlihatkan pembagian peran yang cukup lengkap, mencakup unsur kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, asisten lapangan,

admin, kepala gudang, hingga tim operasional (misalnya tim masak dan pencucian ompreng) serta dukungan pengantaran melalui driver. Pola penguatan SDM dan pembagian tugas ini penting karena program bergantung pada kesiapan proses produksi, distribusi, dan pengendalian kualitas agar makanan dapat memenuhi aspek gizi dan keamanan pangan. Ketersediaan SDM juga berkaitan dengan target porsi/kuota penerima, sehingga pengelolaan tenaga kerja dituntut proporsional terhadap skala layanan tidak boleh kekurangan ataupun kelebihan pekerja karena itu dapat membuat pekerjaan menjadi tidak profesional.

Dalam perspektif administrasi publik, direksi dan fleksibilitas operasional yang ditunjukkan oleh SPPG melalui substitusi menu dan penunjukan *supplier* cadangan berbasis *MoU* merupakan bentuk mitigasi risiko yang efektif. Hal ini sejalan dengan temuan Winny Yusnanik (2025) yang menyoroti pentingnya keandalan logistic dalam Evaluasi kebijakan.⁵⁵ Keberadaan *MoU* antara SPPG dan penyedia bahan baku mempertegas kepastian hukum serta komitmen jaminan mutu agar bahan pangan tidak memenuhi standar dapat langsung ditolak oleh Kepala Gudang sebelum masuk produksi. Hal ini dilakukan agar apabila kedepannya terjadi sesuatu yang merugikan salah satu hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan *MoU* yang berlaku dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Namun, meskipun struktur organisasi dan perencanaan nutrisi berjalan, penelitian menemukan bahwa *input* menghadapi hambatan utama pada sisi bahan pangan, khususnya keterlambatan informasi dari *supplier* terkait ketersediaan bahan baku

⁵⁵ Jihan Fasabilla et al., “Analisis Kinerja Dan Budaya Organisasi SPPG Dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis” 4, no. 2 (2026): 1288–95.

menjelang H-1 atau hari H. Keterlambatan ini memaksa SPPG melakukan substitusi menu (misalnya perubahan jenis buah) atau mencari supplier alternatif agar produksi tetap berjalan. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan *input* bahan pangan merupakan faktor kunci dalam menjaga kesinambungan penyajian makanan bergizi sesuai rencana menu.

Selain ketersediaan bahan, mekanisme perencanaan nutrisi yang ditangani ahli gizi juga menunjukkan proses pengendalian yang cukup ketat. Sebelum menu disajikan, ahli gizi memperhitungkan gramasi dan kandungan nutrisi; kemudian asisten lapangan melakukan pendataan terkait makanan yang bisa dikonsumsi murid serta pantangan/alergi, termasuk kebutuhan surat keterangan dokter bila ada kondisi khusus. Koordinasi data ini memperlihatkan bahwa *input* tidak hanya soal “ada atau tidaknya makanan”, tetapi juga ketepatan penyaluran berdasarkan kebutuhan individu siswa agar seluruh murid tetap memperoleh MBG. Hal ini juga selaras dengan tujuan program untuk memastikan pemenuhan gizi yang tepat sasaran bagi anak sekolah.

Pada evaluasi proses (*process*), pelaksanaan harian memperlihatkan kepatuhan terhadap SOP melalui briefing sebelum bekerja, pembagian kerja sesuai bidang (misalnya memasak, cuci ompreng, *packing*, *driver*), serta rapat rutin untuk menyelaraskan standar kerja. Pendekatan seperti ini penting karena proses MBG mencakup rantai aktivitas yang rawan terhadap keterlambatan dan ketidaksesuaian (misalnya jumlah ompreng atau kelengkapan distribusi). Selain itu, koordinasi lintas pihak juga menjadi mekanisme kontrol melalui PIC (*Person in Charge*) di sekolah yang berkomunikasi intensif dengan SPPG melalui kanal grup *chat*.

Aspek yang menonjol pada proses adalah penanganan alergi dan kondisi khusus siswa. PIC mengompilasi data siswa yang tidak hadir atau memiliki toleransi alergi berdasarkan surat keterangan wali murid, lalu diteruskan ke SPPG untuk pemberian dispensasi menu. SPPG merespons dengan menyiapkan menu khusus bagi siswa yang memiliki alergi sehingga seluruh murid tetap memperoleh MBG. Hasil ini mengindikasikan bahwa proses Evaluasi tidak berhenti pada distribusi makanan, tetapi juga pada penyesuaian menu dan mitigasi risiko kesehatan siswa. Selain itu, koordinasi yang sigap juga terbukti mampu mengatasi kendala awal bulan Ramadhan 2026 terkait ketidaksesuaian jumlah ompreng dengan jumlah siswa melalui koordinasi PIC sekolah dan pengawas SPPG.

Adapun aspek yang paling menonjol dari Evaluasi MBG di SDN 50 Kota Banda Aceh adalah penerapan mekanisme control kualitas berbasis sekolah. Prosedur Uji Organoleptik yang diterapkan oleh pihak sekolah sebelum dibagikan kepada murid menjadi instrument penapis yang sangat krusial. Jika dibandingkan dengan kasus ditemukannya kasus keracunan di Aceh Timur dan daerah lainnya⁵⁶ skema pengujian mandiri di SDN 50 Banda Aceh terbukti berhasil menekan risiko keracunan hingga nol kasus. Selain itu, adanya koordinasi melalui PIC sekolah dan saluran komunikasi digital memungkinkan respons cepat terhadap data presensi siswa serta penyediaan dispensasi menu khusus bagi siswa penderita alergi. Hal ini membuktikan bahwa proses Evaluasi adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan inklusif peserta didik.

⁵⁶ Hayaturrahmah, "Belasan Pelajar Dan Balita Diduga Keracunan MBG Di Aceh Timur," ANTARA ACEH, 2026, <https://aceh.antaranews.com/berita/400286/belasan-pelajar-dan-balita-diduga-keracunan-mbg-di-aceh-timur>.

Pada evaluasi hasil (*product*), temuan menunjukkan bahwa tujuan program dan dampak pada siswa berjalan positif. Program MBG di SDN 50 dinilai berhasil memenuhi ketersediaan gizi harian tanpa menimbulkan masalah kesehatan seperti keracunan makanan, dengan koordinasi yang baik antara SPPG dan sekolah. Keberhasilan dari sisi hasil ini penting karena program MBG pada dasarnya diarahkan untuk mendukung kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi dan peningkatan kualitas belajar anak.

Selanjutnya, indikator hasil yang terkait aspek akademis memperlihatkan bertambahnya kualitas belajar siswa, ditandai dengan siswa menjadi berenergi, ketahanan fisik, dan fokus belajar selama proses pembelajaran. Temuan ini diperkuat oleh mekanisme pemantauan melalui penimbangan berat badan tiap bulan dan pengukuran tinggi badan sebulan sekali, yang selanjutnya datanya diminta untuk memantau isu gizi termasuk stunting. Data menunjukkan perubahan meski tidak besar (perkiraan kenaikan persentase sekitar 2–3% per bulan), namun menunjukkan adanya pergerakan indikator yang relevan dengan tujuan pemenuhan gizi berkelanjutan. Secara keseluruhan, jika ditarik ke dalam kerangka CIPP, Evaluasi MBG di SDN 50 memperlihatkan pola yang konsisten: kesesuaian konteks yang kuat terhadap kebutuhan sasaran, kesiapan *input* melalui struktur SDM dan perencanaan nutrisi, proses yang dikendalikan melalui SOP serta koordinasi PIC, serta output yang ditandai oleh perbaikan aspek gizi dan kesiapan belajar. Meski demikian, hambatan *input* berupa keterlambatan supplier mengindikasikan bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi ketahanan rantai pasok; karena itu, penguatan sistem informasi dan manajemen risiko bahan baku menjadi faktor krusial agar program tetap berjalan stabil, terutama pada kondisi fluktuatif ketersediaan pangan.

Secara keseluruhan, sintesis kerangka evaluasi CIPP menunjukkan bahwa Evaluasi Program MBG di SDN 50 Kota Banda Aceh telah berjalan secara struktur, kolaboratif, dan adaptif dalam menjawab kebutuhan nutrisi dasar peserta didik. Keselarasan yang kuat antara landasan kebijakan nasional dan kondisi sosiologis sasaan (*Context*) ditopang oleh keandalan struktur organisasi serta ketatnya perencanaan gizi (*input*), kepatuhan terhadap SOP dan pengawasan mutu berbasis sekolah melalui uji organoleptic (*process*), hingga munculnya dampak positif pada focus belajar serta stabilitas tren antropometri siswa (*product*). Keberhasilan dalam menekan risiko kontaminasi hingga nol kasus (*zero accident*) membuktikan bahwa sinergi dinamis antara SPPG Lamlagang dan tim PIC sekolah mampu menjadi role model tata Kelola MBG di tingkat local. Meskipun demikian, ditemukannya kerentanan pada rantai pasok bahan baku menegaskan bahwa keberlanjutan dampak jangka Panjang program ini sangat bergantung pada penguatan mitigasi risiko logistic dan kepastian jaminan *ssupplier*. Dengan demikian, penguatan kolaborasi multi actor dan digitalisasi rantai pasol menjadi prasyarat mutlak agar Program MBG tidak hanya sukses menjadi intervensi pemenuhan gizi sesaat, melainkan tumbuh menjadi instrument investasi social yang berkelanjutan dalam mencetak sumber daya manusia unggul sejak dini

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada SPPG Banda Raya Lamlagang dan SDN 50 Kota Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program secara umum telah berjalan dengan baik. Program MBG mampu menjangkau peserta didik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, khususnya siswa SDN 50 yang sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu. Kehadiran program ini dinilai relevan dengan kebutuhan peserta didik karena membantu memenuhi kebutuhan gizi harian serta mendukung kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.

Berdasarkan evaluasi konteks (*Context evaluation*), program MBG di SDN 50 Kota Banda Aceh telah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat. Tingginya jumlah siswa serta latar belakang sosial-ekonomi keluarga peserta didik menjadi alasan penting bahwa program ini tepat sasaran. Selain membantu menyediakan makanan bergizi, program MBG juga dinilai mampu meningkatkan semangat, energi, dan konsentrasi siswa selama proses pembelajaran. Kerja sama antara pihak SPPG dan sekolah yang dituangkan melalui kesepakatan tertulis turut memperjelas hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan evaluasi masukan (*input evaluation*), SPPG Banda Raya Lamlagang telah memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang mendukung pelaksanaan program. Struktur tersebut terdiri atas Kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, asisten lapangan,

admin, kepala gudang, tim masak, tim persiapan, tim pencucian ompreng, petugas kebersihan, driver, kernet, serta PIC dari pihak sekolah. Setiap bagian memiliki fungsi masing-masing dalam mendukung proses perencanaan menu, pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, pengemasan, pengiriman, hingga pembagian makanan kepada siswa.

Meskipun demikian, evaluasi *input* menunjukkan masih terdapat hambatan dalam ketersediaan bahan baku, terutama keterlambatan informasi dari supplier mengenai bahan pangan yang tersedia. Kondisi tersebut dapat menyebabkan perubahan menu secara mendadak, khususnya apabila bahan pangan tidak tersedia atau mengalami kenaikan harga. Namun, hambatan tersebut dapat diatasi melalui penggantian bahan makanan, penggunaan supplier alternatif, serta pemeriksaan bahan baku oleh kepala gudang sebelum digunakan dalam proses produksi.

Berdasarkan evaluasi proses (*process evaluation*), pelaksanaan MBG telah mengikuti standar operasional yang ditetapkan oleh SPPG. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan briefing sebelum bekerja, pembagian tugas berdasarkan bidang, penerapan prosedur pencucian ompreng, pemorsian, pengemasan, dan pengantaran makanan. Jarak SPPG Banda Raya Lamlagang yang berdekatan dengan SDN 50 juga mendukung ketepatan waktu distribusi makanan, sehingga makanan dapat diterima sekolah sebelum jam istirahat.

Koordinasi antara SPPG dan pihak sekolah juga berjalan cukup efektif melalui keberadaan PIC. PIC berperan sebagai penghubung antara sekolah dan SPPG, terutama dalam menyampaikan data siswa yang tidak hadir, memiliki alergi, atau membutuhkan menu khusus. Mekanisme ini memungkinkan SPPG memberikan dispensasi menu bagi

siswa yang memiliki alergi terhadap makanan tertentu. Kendala ketidaksesuaian jumlah ompreng dengan jumlah siswa yang sempat terjadi pada awal bulan Ramadan 2026 juga dapat diselesaikan melalui koordinasi antara PIC sekolah dan pengawas SPPG.

Berdasarkan evaluasi hasil (*product evaluation*), program MBG telah memberikan dampak positif terhadap peserta didik di SDN 50 Kota Banda Aceh. Program ini membantu memenuhi kebutuhan makanan bergizi harian siswa dan selama pelaksanaannya tidak ditemukan permasalahan serius seperti keracunan makanan. Selain itu, hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan energi, ketahanan fisik, dan konsentrasi siswa dalam mengikuti pembelajaran setelah memperoleh makanan dari program MBG.

Pihak sekolah juga telah melakukan uji organoleptik sebelum makanan dibagikan kepada siswa. Uji tersebut meliputi penilaian terhadap rasa, warna, aroma, dan tekstur makanan dengan menggunakan skala penilaian tertentu. Hasil pengujian menunjukkan bahwa makanan yang disediakan SPPG Lamlagang berada dalam kondisi layak konsumsi. Pemantauan berat badan dan tinggi badan siswa yang dilakukan secara berkala juga menjadi bagian penting dalam melihat perkembangan kondisi gizi peserta didik, termasuk dalam mengidentifikasi potensi masalah stunting.

Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan evaluasi CIPP, Evaluasi MBG pada SPPG Banda Raya Lamlagang dan SDN 50 Kota Banda Aceh dapat dikategorikan berjalan efektif. Aspek konteks menunjukkan kesesuaian program dengan kebutuhan siswa, aspek *input* memperlihatkan adanya sumber daya dan struktur organisasi yang mendukung, aspek proses menunjukkan pelaksanaan yang mengikuti SOP dan koordinasi yang cukup baik, sedangkan aspek produk menunjukkan adanya manfaat terhadap

pemenuhan gizi dan proses belajar siswa. Kendala yang masih ditemukan terutama berkaitan dengan keterlambatan bahan baku dan ketidaksesuaian jumlah makanan, tetapi kendala tersebut sejauh ini dapat ditangani oleh pihak terkait

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak SPPG Banda Raya Lamlagang, perlu meningkatkan sistem koordinasi dengan supplier agar informasi mengenai ketersediaan dan harga bahan baku dapat diterima lebih cepat, paling lambat satu atau dua hari sebelum proses produksi. Dengan demikian, perubahan menu dapat dilakukan secara terencana dan tidak mengganggu proses pengolahan serta distribusi makanan.
2. SPPG perlu memperkuat sistem supplier cadangan dan membuat daftar bahan pangan pengganti yang memiliki kandungan gizi setara. Hal ini penting untuk menjaga kualitas menu ketika bahan pangan tertentu tidak tersedia atau mengalami kenaikan harga.
3. Bagi pengelola SPPG, pengawasan terhadap jumlah porsi dan jumlah ompreng perlu ditingkatkan sebelum makanan dikirim ke sekolah. Pemeriksaan akhir dapat dilakukan menggunakan daftar cek yang disesuaikan dengan jumlah siswa penerima manfaat, sehingga risiko kekurangan atau kelebihan ompreng dapat diminimalkan.
4. SPPG perlu mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan briefing, pelatihan, serta evaluasi rutin bagi seluruh tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja juga perlu

dipertimbangkan apabila jumlah penerima manfaat meningkat agar beban kerja setiap divisi tetap seimbang dan kualitas makanan dapat dipertahankan.

5. Bagi pihak SDN 50 Kota Banda Aceh, koordinasi dengan SPPG melalui PIC perlu dipertahankan dan dilakukan secara lebih terstruktur. Data siswa yang tidak hadir, memiliki alergi, atau membutuhkan menu khusus sebaiknya diperbarui secara berkala agar dapat menjadi dasar penyusunan dan distribusi makanan.
6. Pihak sekolah perlu mempertahankan pelaksanaan uji organoleptik sebelum makanan dibagikan kepada siswa. Hasil penilaian sebaiknya didokumentasikan secara rutin sebagai bahan evaluasi kualitas makanan dan sebagai laporan kepada pihak SPPG apabila ditemukan perubahan rasa, aroma, warna, tekstur, atau kondisi makanan.
7. Sekolah perlu meningkatkan pengawasan pada saat pembagian makanan dan pengembalian omprang. Pembagian tugas kepada wali kelas, siswa yang bertugas, dan PIC harus dilakukan secara jelas agar proses distribusi berlangsung tertib, cepat, dan tidak menimbulkan kekurangan porsi bagi siswa.
8. Bagi Badan Gizi Nasional dan pihak terkait, diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan MBG di tingkat SPPG dan sekolah. Evaluasi tersebut tidak hanya mencakup ketepatan distribusi, tetapi juga kualitas menu, keamanan pangan, kecukupan tenaga kerja, kepatuhan terhadap SOP, serta perkembangan status gizi siswa.
9. Pemerintah dan pihak pengelola program perlu membangun sistem pelaporan yang lebih terintegrasi antara SPPG, sekolah, posyandu, dan pihak terkait lainnya. Data berat badan, tinggi badan, kehadiran siswa, alergi, serta penerimaan siswa

terhadap menu dapat digunakan untuk menilai dampak program secara lebih objektif.

10. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai MBG dapat dikembangkan dengan cakupan lokasi dan informan yang lebih luas. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan data kuantitatif mengenai perubahan status gizi, tingkat kehadiran siswa, konsentrasi belajar, serta tingkat kepuasan siswa dan orang tua sehingga dampak program dapat diukur secara lebih komprehensif



DAFTAR PUSTAKA

- Eddy Cahyono Sugiarto, "Makan Bergizi Gratis dan SDM Unggul," *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 18 Desember 2024,
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, LN 2024 (173): 22 hlm
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh. "Pemantauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Banda Aceh." dpmg.bandacehkota.go.id, 6 Januari 2025.
- Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2024), Pasal 5
- Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), 1
- Taali, M., Darmawan, A., & Maduwinarti, A. (2024). *Teori dan Model Evaluasi Kebijakan: Kajian kebijakan kurikulum pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.hlm 1.
- Muadi, S., Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195-224.hlm 197.
- Harel Seatren, "Implementing the third generation research paradigm in policy implementation research: An empirical assessment", (2014).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 194
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Muryadi, A. D. (2017). *Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi (Agustanico Dwi Muryadi) Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi*. 3(1).
- Nadia Mayisi. (2023). *Efektivitas Penggunaan Model Pembelajaran Picture And Picture Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ipa Di Sdn 23 Kaur*. UIN Fatmawati Sukarno.
- Notha, M., Mayang Sari, S., Bina Bangsa Getsempena, U., & Aceh, B. (2025). Penerapan Implikasi MBG (Makan Bergizi Gratis) di Sekolah Dasar. In *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 5). <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety>
- Prima Gandhi. (2025, June 9). *Keamanan Pangan dan Keracunan MBG*. SURAT & OPINI.
- Yulia Citra. (2023). *Studi Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Luar Biasa Negeri Se- Diy*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Wiyanda Vera Nurfajriani, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, M. Win Afgani, dan Rusdy Abdullah Sirodj, "Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–827.

- Fajri Fatmawati. (2025, January 7). *Program Makan Bergizi Gratis Dimulai di Banda Aceh*. Metrotvnews. <https://www.metrotvnews.com/read/Ky6C1EZp-program-makan-bergizi-gratis-dimulai-di-banda-aceh>
- Badan Gizi Nasional, Daftar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, diakses 30 Desember 2025. <https://www.bgn.go.id/operasional-sppg?page=3&search=banda%20Aceh>
- Redaksi, “Ditemukan Belatung pada Menu MBG di SDIT Azkiya, Kajari Bireuen Turun Tangan,” Kabar Bireuen, 19 September 2025, diakses 19 September 2025, <https://kabarbireuen.com/ditemukan-belatung-pada-menu-mbg-di-sdit-azkiya-kajari-bireuen-turun-tangan/>
- Admin Humas, “Kawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Wali Kota Illiza Kunjungi SDN 50,” Prokopim Banda Aceh, 16 Mei 2025, <https://prokopim.bandaacehkota.go.id/berita/41600/kawal-program-makan-bergizi-gratis-mbg-wali-kota-illiza-kunjungi-sdn-50.html>
- Siti Muniroh, S. A. A. H. W. (2024). Penerapan Media Pembelajaran Projected Motion Dalam Meningkatkan Afektif Siswa Pada Materi Gerakan Dan Bacaan Sholat Di Kelas Ii Sdn Mangunan I Kabuh Jombang. *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(1). <https://publisherqu.com/index.php/AI-Furqan>
- Septiana Louisa Silaban, Sutri Destemi Elsi, & Dimas Rizal. (2026). Analisis Evaluasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Jambi Menurut Teori Evaluasi Kebijakan Merilee S. Grindle. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 3(1), 137–149. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v3i1.1547>
- B A B Iii, “Metope,” *Oxford Art Online*, 2018, 31–38, <https://doi.org/10.1093/gao/9781884446054.article.t057475>



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

INDIKATOR	INFORMAN	PERTANYAAN
Evaluasi Konteks Relevansi program dengan kebutuhan lingkungan, masalah yang melatarbelakangi, dan kesesuaian tujuan	Kepala Dapur SPPG	1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat kebutuhan gizi anak-anak di wilayah ini sebelum program dimulai? 2. Apa tantangan utama lingkungan sekitar dalam mendukung gizi sehat?
	Kepala Sekolah	1. Sejauh mana program MBG ini menjawab permasalahan kesehatan atau daya konsentrasi siswa di sekolah ini?
	Guru/Wali Kelas	1. Sejauh mana program MBG ini menjawab permasalahan kesehatan atau daya konsentrasi siswa di sekolah ini?
	Petugas	1. Berdasarkan pengamatan Anda di lapangan, masalah gizi atau kebiasaan makan apa yang paling menonjol pada siswa di lingkungan sekolah sasaran sehingga program ini dianggap sangat mendesak untuk dilaksanakan?
	Murid	1. Apakah adik-adik merasa terbantu dengan adanya makan siang gratis ini agar tidak jajan sembarangan?
	Wali Murid	1. Menurut Bapak/Ibu, apakah program ini sudah sesuai dengan kebutuhan makanan bergizi yang sulit dipenuhi di rumah?

Evaluasi <i>Input</i> Strategi, sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana, dan pembiayaan.	Kepala Dapur SPPG	1. Bagaimana kesiapan fasilitas dapur dan alat distribusi? 2. Apakah jumlah petugas sudah mencukupi untuk melayani target porsi harian?
	Kepala Sekolah	1. Bagaimana kesiapan sekolah dalam menyediakan tempat makan dan pengaturan jadwal agar tidak mengganggu jam pelajaran?
	Guru/Wali Kelas	1. Sejauh mana pihak sekolah telah menyiapkan prosedur atau pembagian tugas di antara para guru untuk mengatur jadwal makan siswa agar tidak berbenturan dengan jam efektif belajar-mengajar?
	Petugas	1. Bagaimana kesiapan fasilitas dapur dan alat distribusi? 2. Apakah jumlah petugas sudah mencukupi untuk melayani target porsi harian? 3. Apakah bahan baku yang diterima dari mitra lokal selalu dalam kondisi segar dan sesuai standar mutu?
	Murid	1. Sejauh mana adik-adik merasa bahwa menu makanan yang direncanakan oleh sekolah sudah sesuai dengan jenis makanan sehat yang adik-adik sukai atau butuhkan agar lebih semangat belajar?
	Wali Murid	1. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi yang jelas mengenai komposisi gizi atau menu yang diberikan kepada anak?
Evaluasi Proses	Kepala Dapur SPPG	1. Bagaimana prosedur pengawasan kualitas makanan

Evaluasi strategi di lapangan, ketepatan jadwal, kendala distribusi, dan pengawasan mutu.		sebelum didistribusikan untuk mencegah kontaminasi atau kerusakan (seperti kasus belatung)?
	Kepala Sekolah	1. Bagaimana ketepatan waktu pengiriman makanan ke sekolah? Apakah ada kendala saat pembagian makanan di kelas?
	Guru/Wali Kelas	1. Bagaimana ketepatan waktu pengiriman makanan ke sekolah? Apakah ada kendala saat pembagian makanan di kelas?
	Petugas	1. Bagaimana prosedur pengawasan kualitas makanan sebelum didistribusikan untuk mencegah kontaminasi atau kerusakan (seperti kasus belatung)?
	Murid	1. Bagaimana rasa makanan dan kebersihan wadah makanan yang adik-adik terima setiap hari?
	Wali Murid	1. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapati keluhan dari anak mengenai proses pembagian atau kondisi makanan saat dikonsumsi?
Evaluasi Produk Pencapaian tujuan, perubahan perilaku, dan keberlanjutan program.	Kepala Dapur SPPG	1. Sejauh mana target jumlah penerima manfaat tercapai setiap bulannya? Apakah ada rencana peningkatan kualitas menu ke depan? 2. Sejauh mana efektivitas sistem pelaporan dan evaluasi hasil kerja petugas di lapangan dalam memastikan bahwa dampak positif program MBG ini dapat dirasakan secara

		merata dan berkelanjutan oleh seluruh kelompok rentan di Kota Banda Aceh?
Kepala Sekolah		1. Apakah terlihat perubahan pada tingkat kehadiran atau semangat belajar siswa setelah program ini berjalan?
Guru/Wali Kelas		1. Apakah terlihat perubahan pada tingkat kehadiran atau semangat belajar siswa setelah program ini berjalan?
		1. Bagaimana Anda menilai keberhasilan program ini dalam mengubah kebiasaan makan siswa, dan apakah terdapat laporan penurunan kasus masalah gizi atau peningkatan stamina fisik siswa setelah mengonsumsi makanan dari SPPG secara rutin?
Murid		1. Setelah makan siang gratis, apakah adik-adik merasa lebih bersemangat mengikuti pelajaran sampai sore?
Wali Murid		1. Apakah ada perubahan pola makan anak di rumah setelah mendapatkan edukasi gizi melalui program ini?

Lampiran 2. Surat Keputusan Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3097/Un.08/FISIP/Kp.07.6/12/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;

b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **06 November 2025**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :

1. **Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.** Sebagai pembimbing I

2. **Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.** Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :

Nama : **Rahmat Khalid**

NIM : **210802093**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Judul : **Implementasi Kebijakan Program Makanan Bergizi Gratis di Kota Banda Aceh**

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditandatangani di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 08 Desember 2025
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-1115/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh; Kepala Sekolah SDN 50 Kota Banda Aceh; Kepala Dapur SPPG Lamlagang Banda Raya I Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210802093

Nama : RAHMAT KHALID

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Jln. Yossudarso Jurong Mulia Cot ba'u

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAN MAKANAN BEGIZI GRATIS DI SDN 50 KOTA BANDA ACEH**

Banda Aceh, 15 Juli 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 30 November 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian dari Dinas Pendidikan Aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN. P. NYAK MAKAM NO. 23 GP. KOTA BARU TELP/FAX. (0651) 7555136, 7555137
E-mail: dikbud@bandaacehkota.go.id Website: dikbud.bandaacehkota.go.id

Kode Pos: 23125

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 074/A3/ 2837

TENTANG
PENGUMPULAN DATA PADA SD NEGERI 50 KOTA BANDA ACEH

Dasar : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh nomor : B-1115/Un.08/FISP.1/PP.00.9/06/2026 tanggal 15 Juli 2026, perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

MEMBERI IZIN

Nama : Rahmat Khafid
NIM : 210802093
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : S-1
Untuk : Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :
"Implementasi Kebijakan Program Makanan Bergizi Gratis di SDN 50 Kota Banda Aceh."

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Harus berkonsultasi langsung dengan Kepala Sekolah yang bersangkutan dan sepanjang tidak mengganggu proses belajar mengajar.
2. Bagi mahasiswa yang bersangkutan supaya menyampaikan foto copy hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.
3. Surat ini berlaku sejak tanggal 16 Juli s.d 16 Agustus 2026
4. Kepala sekolah dibenarkan mengeluarkan surat keterangan hanya untuk yang benar – benar telah melakukan pengumpulan data

Demikianlah surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 16 Juli 2026 M
1 Safar 1448 H
An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH
RABID PEMBIKSIAN SD

M. Pd
06061993051001

Tembusan :

1. Dekan Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Mahasiswa/i yang bersangkutan

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 50 Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Wali Murid SDN 50 Kota Banda Aceh



Wawancara dengan murid-murid SDN 50 Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Wali Kelas dan Guru-guru SDN 50 Kota Banda Aceh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Rahmat Khalid
 Tempat Tanggal Lahir : Sabang 13 Agustus 2002
 No Handphone : 08126946489
 Alamat : Gampong Cot Ba'u, Jurong mulia
 Email : rahmatkhalid19@gmail.com

Pendidikan

Sekolah Dasar : MIN kota Sabang
 Sekolah Menengah Pertama : MTSN Kota Sabang
 Sekolah Menengah Atas : MAN Kota Sabang

Sertifikasi

Ma'had Jamiah : 80
 TOEFEL : 400
 Komputer : B+
 Magang : 80
 KPM : 97

